BADAN POM

Laporan Kinjerja

TRIWULAN II

BALAI POM DI DUMAI

2025

Jl. Hangtuah No 51A / 51B, Kel. Buluh Kasap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai
bpom.dumai Bpom Dumai 0813 7231 5669 0765-37792

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Triwulan II Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai Tahun 2025 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Dumai Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2025 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target Triwulan II Tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan I diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai pada triwulan berikutnya.

Dumai, 18 Juli 2025
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Dumai



Emi Amalia, S.Farm.,Apt,M.Sc

JANUARI 2025

Pengawasan Sarana Distribusi

Januari 2025



Petugas Loka POM di Kota Dumai Melakukan Pengawasan SARYANFAR dan sarana distribusi

Pada tanggal 15, 16, 22 Januari 2025, Petugas Loka POM di Kota Dumai melakukan pengawasan pada sarana distribusi suplemen kesehatan dan sarana pelayanan kefarmasian (SARYANFAR) di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin keamanan mutu obat dan suplemen kesehatan di wilayah Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.

Pemeriksaan dilakukan pada 4 Sarana yang terdiri dari 1 sarana distribusi suplemen kesehatan, dan 3 SARYANFAR. Berdasarkan pemeriksaan sarana tersebut didapatkan hasil bahwa sarana memenuhi ketentuan. Diharapkan dengan adanya pengawasan sarana distribusi ini, pemilik toko dan pembeli selalu menerapkan CEK KLIK saat menjual dan membeli barang.







AUDIT PENERAPAN CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik)

Januari 2025

Pada tanggal (13/01 s.d 14/01) Petugas Loka POM di Kota Dumai melakukan pemeriksaan pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada salah satu sarana distribusi obat yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Kota Dumai. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan ini, pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk dapat melakukan kegiatan distribusi obat dengan menerapkan seluruh aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berkontribusi untuk memastikan obat yang beredar di masyarakat aman dan bermutu.













Sampling
Obat dan Makanan

Januari 2025

Pada tanggal (14/01 s.d 16/01), Petugas Loka POM di Kota Dumai melakukan kegiatan sampling di wilayah Kota Dumai. Sampling produk yang diambil terdiri dari produk obat, kosmetik, pangan, dan obat tradisional. Sampling dilakukan di beberapa sarana seperti toko, apotek dan swalayan.

Diharapkan dengan pengawas rutin post market surveillance sampling dan pengujian produk yang beredar, masyarakat Kota Dumai terlindungi dari konsumsi obat dan makanan yang ilegal, dan mengandung bahan berbahaya serta cemaran.



KIE

Komunikasi,
Informasi,
Edukasi

Car Free Day (CFD)

19 Januari 2025







Hari Minggu (19/05), Loka POM di Kota Dumai membuka booth layanan informasi obat dan makanan di area car free day Kota Dumai. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut HUT BPOM ke-24, dengan mengusung tema "cek produkmu, bersama BPOM" yang dilakukan serentak oleh BPOM diseluruh Indonesia. Loka POM di Kota Dumai hadir di tengah masyarakat untuk memberikan layanan informasi serta edukasi terkait keamanan obat dan makanan. Tidak hanya itu, Loka POM di Kota Dumai juga menyediakan pelayanan pengujian makanan menggunakan rapid test terhadap 4 parameter bahan berbahaya yang terkandung pada makanan (formalin, boraks, methanyl yellow, rhodamin b) terhadap 14 sampel pangan yang diuji didapatkan hasil memenuhi syarat (MS).

Antusias masyarakat sangat tinggi untuk mendapatkan informasi obat dan makanan. Selain booth display produk obat dan makanan, terdapat booth games dan hadiah menarik. Diharapkan dengan adanya Loka POM di Kota Dumai meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terkait keamanan mutu Obat dan Makanan.









kamis (30/01) Petugas Loka POM di Kota Dumai melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dalam rangka HUT BPOM ke-24. Nah kegiatan ini dilaksanakan di Yayasan Al Huda Dumai dan dihadiri oleh 100 orang peserta yang terdiri dari guru- guru serta siswa/i Mts dan Ma Al-Huda Dumai.

Dalam kegiatan ini, acara dibuka oleh kepala sekolah mts Al-Huda yaitu Bapak Mustafa, S.Ag. Kegiatan juga dihadiri oleh Kepala Loka POM di Kota Dumai, Ully Mandasari, S.Farm.,Apt, M.H. Narasumber pada kegiatan ini yaitu Rozalia, S.Si memaparkan materi 5 kunci keamanan pangan anak sekolah. Tidak lupa, petugas juga mengingatkan untuk menjadi konsumen cerdas dengan menerapkan Cek KLIK sebelum berbelanja. Peserta tampak antusias pada kegiatan ini, dapat dilihat dari banyak siswa yang aktif dalam menjawab beberapa pertanyaan dari narasumber.

KIE PJAS

Komunikasi, Informasi, Edukasi

Pangan Jajan Anak Sekolah

30 Januari 2025

Petugas juga melakukan penyebaran informasi terkait keamanan obat dan makanan dengan memberikan paket edukasi berupa poster untuk dipajang di mading guna memberikan informasi kepada anak dan guru di sekolah tersebut.

Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini, masyarakat khususnya guru dan siswa/i mengerti pentingnya menerapkan 5 kunci keamanan pangan.

FEBRUARI 2025









Pengawasan
Sarana Distribusi & Sarana Pelayanan Kefarmasian

Pada tanggal 04 dan 26 Februari 2025. Dalam rangka menjamin keamanan mutu produk obat dan makanan yang beredar di Kota Dumai. Petugas Loka POM di Kota Dumai melakukan pengawasan pada sarana distribusi pangan, obat, OBA dan Sarana Pelayanan Kefarmasian (SARYANFAR).

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada 4 sarana, 3 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan. Terhadap ketidaksesuaian tersebut, petugas melakukan pembinaan kepada pemilik dan penanggung jawab sarana agar segera melakukan perbaikan dengan mengirimkan dokumen Tindakan Perbaikan dan Pencegahan kepada petugas.





Pengawasan
Sarana Produksi

04 Februari 2025

Dalam rangka memonitor penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), pada tanggal (04/02) Petugas Loka POM di Kota Dumai melakukan kegiatan pengawasan pada salah satu sarana produksi pangan olahan di Kota Dumai.

Petugas melakukan pemeriksaan mulai dari dokumen, area produksi, dan proses produksi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada 1 (satu) sarana produksi pangan mendapatkan hasil sarana memenuhi ketentuan.

Diharapkan dengan adanya pengawasan rutin ini memastikan produsen pangan olahan menerapkan aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sehingga pangan olahan yang diproduksi terjamin mutu dan kualitasnya.

SAMPLING
OBAT DAN MAKANAN

Februari 2025

PPetugas Loka POM di Kota Dumai melakukan kegiatan sampling di wilayah kabupaten Bengkalis, Duri. Sampling produk yang diambil terdiri dari produk obat, kosmetik, pangan dan obat tradisional. Sampling dilakukan di beberapa sarana seperti toko, apotek dan swalayan.

Kegiatan sampling ini bertujuan untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat merupakan produk yang sesuai dengan komitmen pelaku usaha dalam menjaga konsistensi keamanan dan mutu produk yang diproduksi dan diedarkan.

Diharapkan dengan pengawas rutin post market surveillance sampling dan pengujian produk yang beredar, masyarakat terlindungi dari konsumsi obat dan makanan ilegal, dan mengandung bahan berbahaya serta cemaran.













INFOPOM

(Informasi Seputar Obat dan Makanan)

12 Februari 2025

Selasa (11/02), Petugas Loka POM di Kota Dumai melakukan edukasi melalui informasi pada mading INFOPOM (Informasi Seputar Obat dan Makanan) di seluruh Puskesmas Kota Dumai. Kali ini informasi terkait SIKOMAN (Seputar Informasi Kosmetik Aman).

Petugas juga mengedukasi pengunjung puskesmas secara langsung terkait informasi yang tertera pada INFOPOM dan memberikan leaflet CEK KLIK kepada pengunjung puskesmas. Pengunjung tampak antusias dengan adanya INFOPOM pada puskesmas di Kota Dumai.









DATUK PANGLIMA

(eDukasi obAT dan makanan UntuK penumPANG kapal di bengkaLIs dan duMAi)

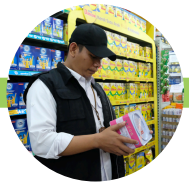
27 Februari 2025

Kamis (27/02), BPOM Dumai melaksanakan kegiatan DATUK PANGLIMA (eDukasi obAT dan makanan UntuK penumPANG kapal di bengkaLIs dan duMAi) di kapal penyebrangan roro Dumai - Rupat loh! Bertempat di ruang tunggu kapal roro, kegiatan ini dilakukan kepada 154 orang penumpang kapal yang berasal dari beberapa daerah di Riau.

Diharapkan dengan adanya kegiatan DATUK PANGLIMA ini, masyarakat penumpang kapal penyebrangan roro khususnya Dumai - Rupat paham terkait bahaya pengonsumsian obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat serta mengerti bagaimana tata cara pengonsumsian obat yang tepat selama bulan ramadhan.

MARET 2025





Intensifikasi

Pengawasan Pangan Ramadhan

Maret 2025

pada tanggal 03, 05, 06, 11, 18, dan 21 Maret 2025, Loka POM di Kota Dumai melakukan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Ramadhan di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengawasan post-market dan juga sebagai salah satu upaya mengantisipasi peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Target pengawasan meliputi sarana distribusi pangan olahan seperti toko dan supermarket di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir.

Dari pengawasan yang dilakukan pada 12 sarana mendapatkan hasil, 5 sarana memenuhi ketentuan dan 8 sarana tidak memenuhi ketentuan. Terhadap ketidaksesuaian tersebut, petugas melakukan pembinaan kepada penanggung jawab sarana agar segera melakukan perbaikan dengan mengirimkan dokumen tindakan perbaikan dan pencegahan kepada petugas.

Diharapkan dengan adanya kegiatan pengawasan ini, pangan yang beredar khususnya di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir aman dan bermutu.



KIE

Komunikasi, Informasi, Edukasi

Pangan Jajanan Pasar Ramadhan (Takjil)







Pada tanggal 04, 05, 06 Maret 2025, Petugas BPOM Dumai melakukan sampling dan uji cepat pangan takjil di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Petugas melakukan sampling dan pengujian terhadap 70 takjil yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Dari 70 sampel yang diuji menggunakan testkit, semuanya dinyatakan memenuhi syarat. Artinya semua sampel tersebut bebas dari bahan berbahaya (boraks, formalin, rhodamin B, dan methanil yellow).

Selain sampling dan pengujian, petugas juga melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada penjual takjil dengan membagikan poster terkait tips keamanan pangan berjualan kue tradisional dan leaflet tentang bahan berbahaya pada pangan.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat khususnya daerah Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir menjadi paham tentang apa saja bahan berbahaya pada pangan serta makanan takjil yang dijual aman sampai ditangan konsumen.



Audiensi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BERSAMA LINTAS SEKTOR

11 Maret 2025

Selasa (11/03), Mengawali pelaksanaan intervensi Program Prioritas Nasional (Pro PN) BPOM Tahun 2025 yang terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman, Kepala Loka POM di Kota Dumai Ully Mandasari melakukan audiensi bersama Walikota Dumai H. Paisal.

Audiensi tersebut dihadiri oleh pimpinan OPD Pemerintah Kota Dumai yang akan terlibat dalam pelaksanaan Pro PN di Kota Dumai seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan.

Audiensi ini membahas terkait pemilihan lokus yang akan diintervensi. Lokus yang terpilih nantinya akan melaksanakan berbagai tahapan program keamanan pangan.

Semoga dengan dukungan penuh Walikota Dumai beserta jajarannya dapat mensukseskan pelaksanaan kegiatan Pro PN BPOM Tahun 2025 dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kota Dumai.











Forum Konsultasi Publik

Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025 - 2029

14 Maret 2025

Pada hari Jum'at (14/3), Kepala Loka POM di Kota Dumai menghadiri undangan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025 - 2029 yang Bertempat di Gedung Sri Bunga Tanjung Dumai.

Kegiatan ini di hadiri oleh Walikota Dumai H. Paisal sekaligus membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai yang di selenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai. RPJMD ini merupakan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun kedepan yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah.

Dalam sambutannya walikota Dumai H. Paisal mengingatkan kepada seluruh OPD untuk mendisiplinkan seluruh ASN, serta memaksimalkan anggaran, selain itu beliau juga menegaskan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan setiap kerja agar mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

Turut hadir juga pada kesempatan tersebut yaitu, Wakil Walikota Dumai,Sekda Kota Dumai, Ketua DPRD Dumai, Anggota DPRD Dumai, Forkopimda, Ketua LAMR, Para Asisten, Staf Ahli, Ketua TP PKK, Inspektur, Para Kepala OPD, Para Camat dan Lurah, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perusahaan, serta Ketua LPMK.

Semoga dengan adanya kegiatan Forum Konsultasi Publik Ini, diharapkan sinargitas antar lintas sektor dapat terjalin baik demi terwujudnya Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 “Kota Industri yang unggul, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029”.



Audiensi
Bupati Rokan Hilir

17 Maret 2025

Pada senin (17/03), Kepala Loka POM di Kota Dumai melakukan Audiensi ke Kantor Bupati Rokan Hilir. Kegiatan audiensi ini dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Rokan Hilir.

Dalam kesempatan audiensi ini, Kepala Loka POM di Kota Dumai, Ully Mandasari, menyampaikan terkait tugas dan fungsi BPOM Dumai terhadap pengawasan obat dan makanan di Kab. Rokan Hilir yang merupakan salah satu wilayah pengawasan BPOM Dumai. dan juga meminta dukungan kepada pemerintah Kab. Rokan Hilir terkait penguatan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kab. Rokan Hilir.

Dalam hal ini, Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menyampaikan ucapan terima kasih dan dukungan penuh atas komitmen BPOM Dumai untuk terus mengawasi, membina, dan mendampingi para pelaku usaha di Kab. Rokan Hilir.

Setelah itu, Kepala Loka POM di Kota Dumai, juga melanjutkan koordinasi ke Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Rokan Hilir. Dalam kesempatan ini, Kepala Loka POM di Kota Dumai mengapresiasi atas dukungan Bupati Rokan Hilir melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Rokan Hilir yang telah membantu memberikan edukasi kepada masyarakat melalui tayangan videotron di beberapa titik di wilayah Rokan Hilir. Kami sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Kab Rokan Hilir dalam memastikan produk yang beredar aman dan berkualitas, serta mendorong UMKM untuk semakin berkembang dengan standar yang lebih baik.

Semoga kolaborasi ini terus terjalin dengan baik, sehingga kita dapat bersama-sama melindungi kesehatan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui produk pangan dan obat yang aman. BPOM Dumai siap bersinergi untuk mengwujudkan Kab. Rokan Hilir yang lebih sehat, aman dan sejahtera.

SINERGITAS

WUJUDKAN OBAT DAN MAKANAN AMAN

18 Maret 2025





Pada selasa (18/03), Kepala Loka POM di Kota Dumai melakukan koordinasi ke Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto di Gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung Kota Dumai. Wakil Wali Kota Dumai menyambut hangat kedatangan Kepala Loka POM di Kota Dumai.

Pada koordinasi ini, dilakukan pembahasan tentang upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Kepala Loka POM di Kota Dumai menjelaskan perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing. Wakil Wali Kota Dumai mendukung komitmen BPOM Dumai untuk terus melakukan pengawasan obat dan makanan.

Diharapkan sinergitas antara BPOM Dumai dan pemerintah daerah Kota Dumai terus terjalin dengan baik, sehingga dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan serta dapat menekan peredaran obat dan makanan ilegal di Kota Dumai.

AUDIENSI & PAMIT TUGAS

18 Maret 2025





Pada Rabu, 26 Maret 2025, Kepala Loka POM di Kota Dumai, Ully Mandasari, melakukan audiensi sekaligus pamit kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau di Pekanbaru.

Audiensi ini dilakukan sehubungan dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat administrasi di lingkungan Badan POM oleh Kepala Badan POM RI pada 20 Maret 2025 di Jakarta, yang sekaligus menandai berakhirnya masa penugasan Ully Mandasari sebagai Kepala Loka POM di Kota Dumai periode 2021–2025, dan penugasan baru sebagai Kepala Balai POM di Batam.

Dalam kesempatan ini, disampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Riau selama ini, khususnya dalam mendukung penguatan sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah Dumai, Bengkalis, dan Rokan Hilir.

Semoga semangat kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik selama ini dapat terus berlanjut dan diperkuat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi pengawasan obat dan makanan yang adaptif, kolaboratif, dan berdampak langsung bagi perlindungan masyarakat.

APRIL 2025



SERAH TERIMA JABATAN DAN PENANDATANGANAN PRASASTI PENGUKUHAN BALAI POM DI DUMAI









Jum'at (11/4), bertempat di Gedung Pendopo Sri bunga Tanjung, telah di selenggarakan Acara Serah Terima Jabatan Kepala Balai POM di Dumai, dari Ully Mandasari, S.Farm., Apt., M.H kepada Emi Amalia, S.Farm., Apt., M.Sc dan Penandatanganan Prasasti Pengukuhan UPT Balai POM di Dumai dihadiri oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan POM RI, Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si dan Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Nova Emelda, S.Si., MS, Apt., secara daring.

Kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Balai POM di Dumai dan Penandatanganan Prasasti Pengukuhan UPt Balai POM di Dumai dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) berjalan dengan lancar. Acara ini turut di hadiri oleh Wakil Walikota Dumai, Sugiyarto, Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, BBA., MBA, Asisten I setdako Bengkalis, Toharuddin, Kepala BBPOM di Pekanbaru, Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H, Unsur Forkopimda Kota Dumai, Kab. Bengkalis, Kab. Rokan hilir, Ketua LAMR, para Kepala OPD terkait, pimpinan instansi vertikal dan pimpinan perusahaan.

Momentum ini merupakan simbol keberlanjutan berkesinambungan kepemimpinan dan program program BPOM dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan khususnya di wilayah kerja Balai POM di Dumai.

Terima kasih atas dedikasi ibu Ully Mandasari yang telah diberikan selama menjabat sebagai kepala Loka POM di Kota Dumai. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesuksesan dan keberkahan. Dan selamat bertugas kembali di Dumai untuk ibu Emi Amalia, semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah baru sebagai Kepala Balai POM di Dumai untuk mewujudkan obat dan makanan yang aman dalam melindungi kesehatan masyarakat.



Audiensi
Ke Lintas Sektor

17 April 2025







Kamis (17/04), Kepala Balai POM di Dumai, Emi Amalia melakukan audiensi dengan beberapa Pemerintah Kota Dumai, yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kota Dumai, Dinas Perdagangan Kota Dumai, Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dalam penguatan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kota Dumai.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Balai POM menyampaikan harapan terhadap dukungan & komitmen pemerintah daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan pencanangan program prioritas nasional di Kota Dumai mendatang. Beliau juga menyampaikan bagaimana langkah - langkah strategis sehingga bisa berdampingan dengan program pemerintah daerah untuk mendukung tugas dan fungsi BPOM. Dalam beberapa hal seperti, memperkuat pengawasan terhadap AMR (Antimicrobial Resistance), mencegah peredaran produk obat dan makanan ilegal/mengandung bahan berbahaya serta pembinaan pelaku usaha, guna memperkuat UMKM di Kota Dumai dalam hal legalitas perizinan produk obat dan makanan, sehingga produknya lebih kompetitif dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Lintas sektor terkait di Kota Dumai menyambut baik audiensi ini dan menyatakan komitmen Pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan kerjasama dengan Balai POM dalam pengawasan obat dan makanan. Dan juga berharap bahwa kerjasama ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Dumai.

Audiensi ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dan Balai POM dalam pengawasan obat dan makanan, sehingga masyarakat Kota Dumai mendapatkan obat dan makanan yang aman dan berkualitas.



Pengawasan

Sarana Distribusi & Sarana Pelayanan Kefarmasian

April 2025

Pada tanggal 22, 23dan 30 April 2025, Petugas Balai POM di Dumai melakukan pengawasan pada beberapa Sarana Pelayanan Kefarmasian (SARYANFAR) dan sarana distribusi obat di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjamin keamanan mutu produk obat yang beredar.

Petugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan obat meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan dan pendistribusian, pengembalian, pencatatan dan pelaporan, serta pemusnahan obat. Dari pemeriksaan yang dilakukan pada 5 sarana mendapatkan hasil, 3 sarana memenuhi ketentuan dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan.

Terhadap ketidaksesuaian tersebut, petugas melakukan pembinaan kepada penanggung jawab sarana agar segera melakukan perbaikan dengan mengirimkan dokumen tindakan perbaikan dan pencegahan kepada petugas.







Audiensi

Ke Ketua PKK dan Dinas Pendidikan Kota Dumai

22 April 2025





Selasa (22/04), Kepala Balai POM di Dumai, Emi Amalia melakukan audiensi Ke Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dumai dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dalam penguatan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kota Dumai.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Balai POM menyampaikan harapan terhadap dukungan & komitmen Pemerintah Kota Dumai dan PKK Kota Dumai dalam pelaksanaan program prioritas nasional keamanan pangan di Kota Dumai.

Lintas sektor terkait di Kota Dumai menyambut baik audiensi ini dan menyatakan komitmen Pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan kerjasama dengan Balai POM dalam pengawasan obat dan makanan. Dan juga berharap bahwa kerjasama ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Dumai.

INFOPOM

(Informasi Seputar Obat dan Makanan)

23 April 2025





Rabu (23/04), Petugas Balai POM di Dumai melakukan edukasi melalui update informasi di Mading INFOPOM (Informasi Seputar Obat dan Makanan) di seluruh Puskesmas Kota Dumai. Kali ini informasi terkait SIKOMAN (Seputar Informasi Kosmetik Aman) dan SIPWOKE (Seputar Informasi Public Warning Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan).

Selain itu, petugas juga memberikan edukasi kepada pengunjung puskesmas secara langsung terkait informasi yang tertera pada INFOPOM. Pengunjung tampak antusias dengan adanya INFOPOM pada puskesmas di Kota Dumai.









Sampling
Obat dan Makanan

April 2025

Pada tanggal (23/04 s.d 25/04) Petugas Balai POM di Dumai melakukan kegiatan sampling di wilayah Kota Dumai. Sampling produk yang diambil terdiri dari produk obat, kosmetik, pangan dan obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan. Sampling dilakukan di beberapa sarana seperti Puskesmas, toko, apotek dan swalayan. selain sampling petugas juga melakukan pengawasan terhadap produk obat, kosmetik, oba dan pangan yang tidak memenuhi ketentuan di peredaran.

Kegiatan sampling dan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat merupakan produk yang sesuai dengan komitmen pelaku usaha dalam menjaga konsistensi keamanan dan mutu produk yang diproduksi dan diedarkan. Diharapkan dengan pengawas rutin post market surveillance sampling dan pengujian produk yang beredar, masyarakat terlindungi dari konsumsi obat dan makanan ilegal, dan mengandung bahan berbahaya serta cemaran.



UPACARA PERINGATAN

HUT KOTA DUMAI KE 26

27 April 2025







Minggu (27/04) Kepala Balai POM di Dumai menghadiri upacara peringatan HUT Kota Dumai Ke 26 Tahun 2025 di Lapangan Bukit Gelanggang Kota Dumai.

Upacara ini dipimpin langsung oleh Walikota Dumai H. Paisal, S.K.M, MARS sebagai inspektur upacara dan dihadiri oleh Wakil Walikota Dumai, Sekretaris Daerah Kota Dumai, FORKOPIMDA, Instansi vertikal, Instansi pemerintah daerah Kota Dumai, dan seluruh perangkat daerah Kota Dumai.

Dalam amanatnya, Walikota menyampaikan bahwa Hari Jadi Kota Dumai yang ke 26 ini mengusung tema Lanjutkan Pembangunan Kota Idaman ini mengandung prinsip estafet berkelanjutan dengan melakukan pemantapan terhadap sistem, sarana, potensi dan sumberdaya mendukung untuk mewujudkan visi misi Kota Dumai, Kota Idaman.

Dalam momentum ini diharapkan untuk terus tingkatkan sinergitas antara DPRD, FORKOPIMDA, seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, sipil dan militer, swasta serta seluruh komponen masyarakat.

Tahniah Hari Jadi Kota Dumai ke 26, Lanjutkan Pembangunan Kota Idaman.



AUDIENSI

KE KEJAKSAAN NEGERI DUMAI

29 April 2025

Selasa (29/04), Kepala Balai POM di Dumai, Emi Amalia melakukan audiensi ke Kejaksaan Negeri Dumai. Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara Balai POM di Dumai dan Kejaksaan Negeri Dumai dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan, serta memastikan keamanan obat dan makanan di wilayah Dumai.

Audiensi ini merupakan bagian dari upaya BPOM untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk memastikan keamanan dan kualitas obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Diharapkan sinergitas antara Balai POM di Dumai dengan Kejaksaan Negeri Dumai semakin erat dan dapat menurunkan angka kejahatan obat dan makanan di Kota Dumai.









Advokasi Lintas Sektor Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025

30 April 2025

Rabu (30/04), Balai POM di Dumai menggelar kegiatan "Advokasi Lintas Sektor Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025" di Kota Dumai. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini dihadiri 43 peserta secara luring & 21 peserta secara daring yang terdiri dari Lintas Sektor Pemerintah Kota Dumai, Ibu ketua TP PKK Kota Dumai, Lokus intervensi (sekolah, desa dan pasar), akademisi, pelaku usaha dan media.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, H. Indra Gunawan, S.IP,M.Si. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah kota dumai berkomitmen dan mendukung kegiatan prioritas nasional keamanan pangan. Advokasi ini diharapkan dapat menjadi sinergi yang positif antara Pemerintah Kota Dumai dengan Balai POM di Dumai dalam percepatan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktifitas masyarakat serta mengatasi masalah stunting di Kota Dumai.

Dalam kegiatan ini, Emi Amalia, S.Farm., Apt, M.Sc selaku Kepala Balai POM di Dumai menyampaikan melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi mengenai sinergisme kegiatan program keamanan pangan yang terdapat di Kota Dumai.

Dan pemerintah kota Dumai dapat berkomitmen mengawal keberlanjutan program prioritas nasional yang telah diintervensi & mereplikasi program pada kabupaten/ kota. Dilanjutkan pemaparan materi,turut mengundang narasumber dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPU PO) BPOM RI, Eva Yuliana, S.Si,M.Epid menyampaikan materi terkait Advokasi komitmen lintas sektor keamanan pangan & gerakan masyarakat hidup sehat sadar pangan aman (Germas SAPA). Sementara dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, Shintia Rizka, SKM,M.Si menyampaikan materi terkait upaya Dinas kesehatan dalam program keamanan pangan.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatangan lembar komitmen dukungan terhadap kegiatan prioritas nasional keamanan pangan & berita acara forum konsultasi publik. Dilanjutkan diskusi terkait keberlanjutan tahapan program PN & standar pelayanan publik Balai POM di Dumai.

MEI 2025

Pengawasan
Sarana Distribusi & Sarana Pelayanan Kefarmasian

Mei 2025



Petugas Loka POM di Kota Dumai Melakukan Pengawasan SARYANFAR dan sarana distribusi

Pada tanggal 02, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 20 Mei 2025, Petugas Balai POM di Dumai melakukan pengawasan pada sarana distribusi sarana pelayanan kefarmasian (SARYANFAR) di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin keamanan mutu obat dan makanan.

Pada SARYANFAR, petugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan obat meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan dan pendistribusian, pengembalian, pencatatan dan pelaporan, serta pemusnahan obat.

Pemeriksaan dilakukan pada 19 sarana distribusi, didapatkan hasil bahwa 10 sarana memenuhi ketentuan dan 9 sarana tidak memenuhi ketentuan. Diharapkan dengan adanya pengawasan sarana distribusi ini, pemilik toko dan pembeli selalu menerapkan CEK KLIK saat menjual dan membeli barang.









AUDIENSI

KE KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

08 Mei 2025

Kamis (08/05), Kepala Balai POM di Dumai, Emi Amalia melakukan audiensi ke Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara Balai POM di Dumai dan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan, serta memastikan keamanan obat dan makanan di wilayah Rokan Hilir.

Audiensi ini merupakan bagian dari upaya BPOM untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk memastikan keamanan dan kualitas obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Diharapkan sinergitas antara Balai POM di Dumai dengan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir semakin erat dan dapat menurunkan angka kejahatan obat dan makanan di Rokan Hilir.

Pengawasan

Sarana Produksi

Mei 2025

Dalam rangka memonitor penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), pada tanggal 06, 07, 09, 15, 16 Mei, Petugas Balai POM di Dumai melakukan kegiatan pengawasan pada sarana produksi pangan olahan di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.

Petugas melakukan pemeriksaan mulai dari dokumen, area produksi, dan proses produksi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada 5 sarana produksi mendapatkan hasil sarana 3 tidak memenuhi ketentuan dan 2 sarana memenuhi ketentuan.

Diharapkan dengan adanya pengawasan rutin ini memastikan produsen pangan olahan menerapkan aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sehingga pangan olahan yang diproduksi terjamin mutu dan kualitasnya.









Bimbingan Teknis & Penyuluhan Pasar

PROGRAM PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS
Tahun 2025

15 Mei 2025

Kamis, 15 Mei 2025, dalam upaya mensukseskan kegiatan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Balai POM di Dumai bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam Program Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di Pasar dan Dinas Perdagangan Kota Dumai sebagai Pengelola Pasar Kelakap Tujuh dalam kegiatan Survey Pasar yang berlokus di Pasar Kelakap Tujuh.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Pasar bertempat di Aula Gedung Dinas Perdagangan Kota Dumai. Acara ini dihadiri oleh Pengelola dan Pedagang Pasar Kelakap Tujuh serta Asosiasi Pasar Senggol. Dalam pelaksanaanya dilakukan bimbingan teknis bagi pengelola pasar dan penyuluhan bagi pedagang dan asosiasi pasar serta diskusi bersama untuk menentukan persepsi dan langkah nyata sebagai upaya tercapainya tujuan akhir dari Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.





Dengan rangkaian kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemberdayaan dan kemandirian komunitas pasar bagi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam berupaya menjaga keamanan pangan dan ikut mengawasi pangan yang beredar di pasar agar bebas dari bahan berbahaya pangan, khususnya untuk Masyarakat di Kota Dumai.







Selasa (20/05) Balai POM di Dumai melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke - 117 Tahun 2025 dengan tema "Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat".

UPACARA
PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2025

20 Mei 2025

Kegiatan dilakukan di halaman kantor Balai POM di Dumai yang dipimpin oleh Kepala Balai POM di Dumai, Emi Amalia diikuti oleh seluruh staff Balai POM di Dumai.

Dalam amanatnya, Emi Amalia menyampaikan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia disampaikan bahwa mari jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama seperti akar pohon yang menembus tanah. Perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat, namun kokoh menopang kehidupan. Karena sesungguhnya, kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan, berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan, dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama.

Dirgahayu hari kebangkitan Nasional ke - 117.

Mari melangkah bersama, dengan langkah yang tenang namun penuh keyakinan, menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih beradab.



SAMPLING

Obat dan Makanan

Mei 2025

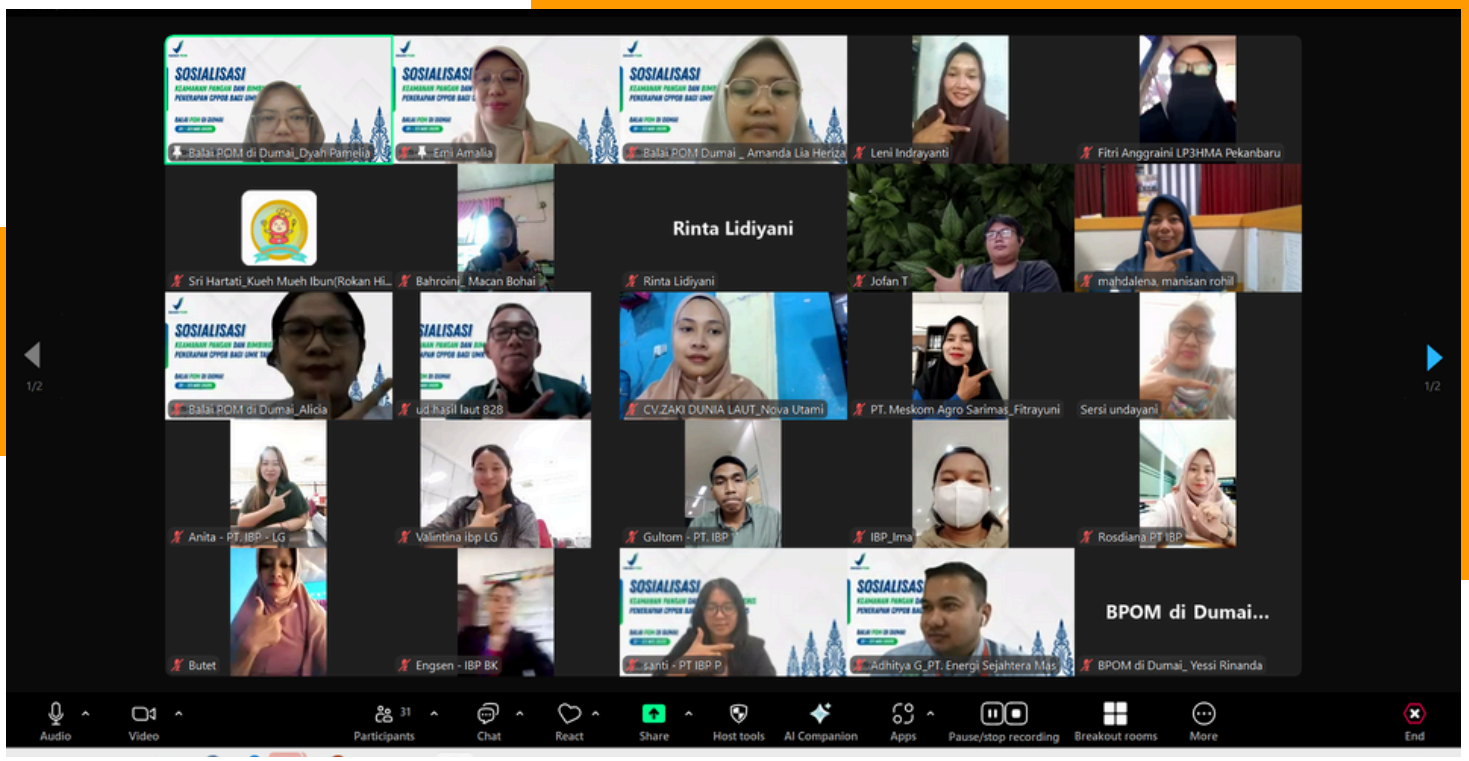


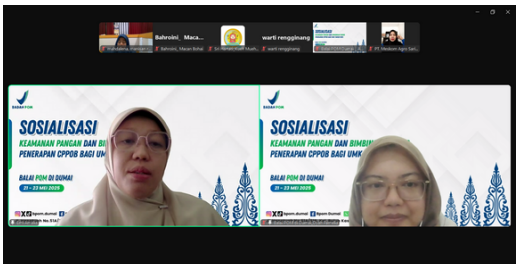


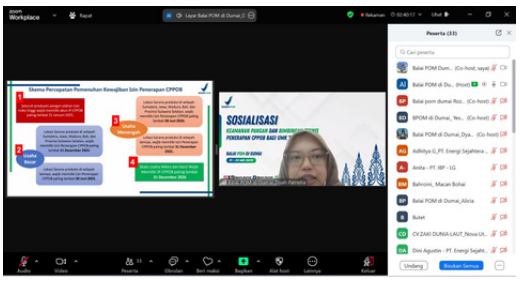
Pada tanggal (20-22 Mei 2025) Petugas Balai POM di Dumai melakukan kegiatan sampling di wilayah Kabupaten Bengkalis. Sampling produk yang diambil terdiri dari produk obat, kosmetik, pangan dan obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan. Sampling dilakukan di beberapa sarana seperti IFLK, rumah sakit, apotek, toko, toko obat dan swalayan.

Kegiatan sampling ini bertujuan untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat merupakan produk yang sesuai dengan komitmen pelaku usaha dalam menjaga konsistensi keamanan dan mutu produk yang diproduksi dan diedarkan.

Diharapkan dengan pengawas rutin post market surveillance sampling dan pengujian produk yang beredar, masyarakat terlindungi dari konsumsi obat dan makanan ilegal, dan mengandung bahan berbahaya serta cemaran.









Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan dan menyampaikan regulasi terbaru dalam produksi pangan olahan, Balai POM di Dumai menyelenggarakan Sosialisasi Keamanan Pangan pada Hari Rabu (21/05), kegiatan dilakukan secara daring melalui zoom meeting.

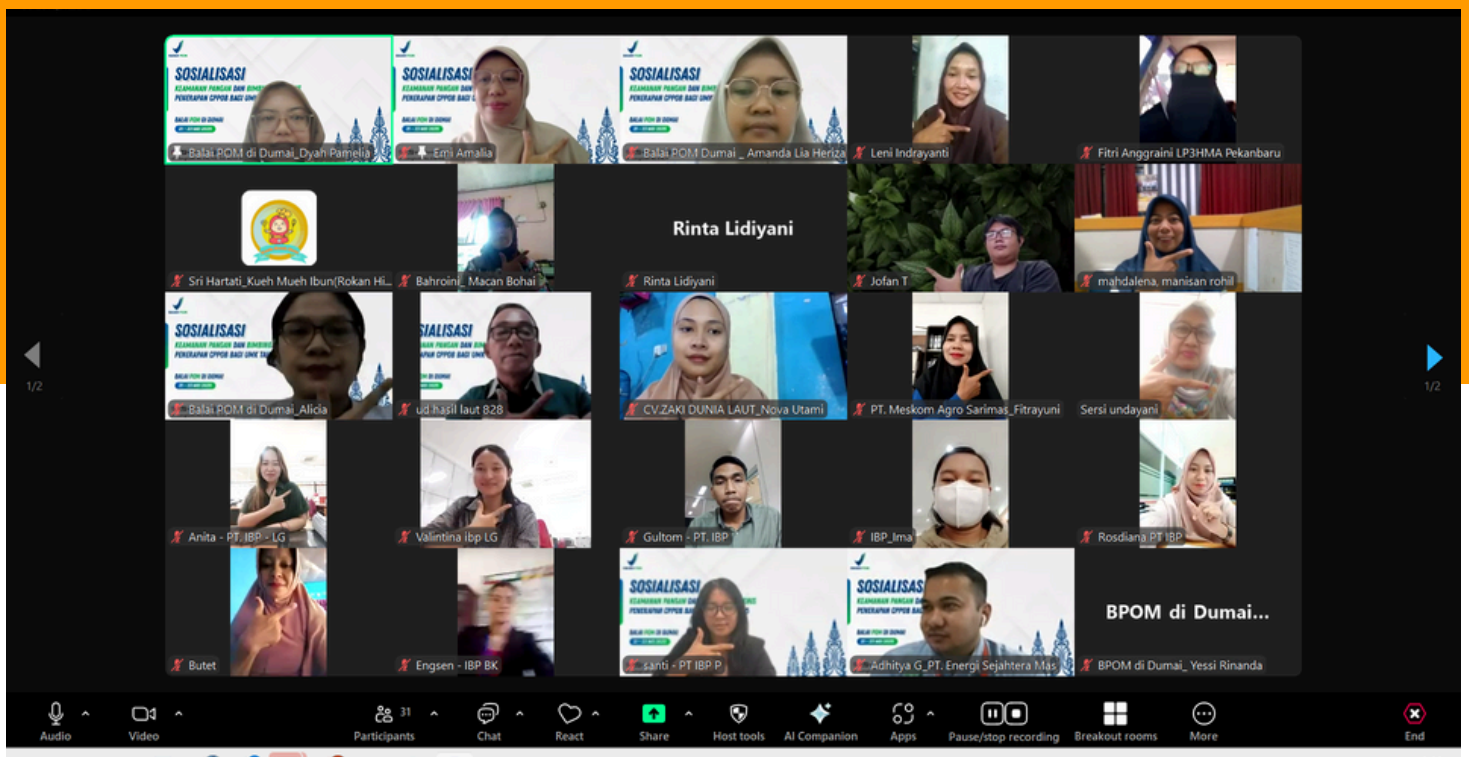
Kegiatan ini dihadiri oleh 25 orang peserta terdiri dari pelaku usaha pangan olahan, baik usaha Mikro Kecil maupun Usaha Menengah Besar di Wilayah Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Dalam kesempatan ini, Emi Amalia, selaku Kepala Balai POM di Dumai turut hadir membuka acara kegiatan. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa kegiatan ini bagian dari gerakan nasional untuk menciptakan ekosistem pangan yang sehat dan aman. Balai POM di Dumai senantiasa terus melakukan pendampingan dan fasilitasi, termasuk melalui program sertifikasi produk pangan olahan, pelatihan teknis, hingga pengurusan izin edar.

Selain itu, disampaikan juga materi terkait sosialisasi keamanan pangan oleh staff Balai POM di Dumai, Dyah Pamelia yang mengajak masyarakat menerapkan keamanan pangan, mengetahui dampak dari bahan berbahaya yang sering ditambahkan ke dalam pangan dan menyampaikan regulasi terbaru terkait pangan olahan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan yang aman, sehingga membangun komunitas yang sadar pangan yang aman terutama di wilayah pengawasan Balai POM di Dumai.

Sosialisasi Keamanan Pangan

21 Mei 2025



Bimbingan Teknis CPPOB

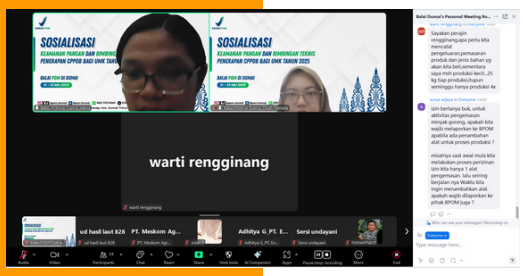
"Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik"

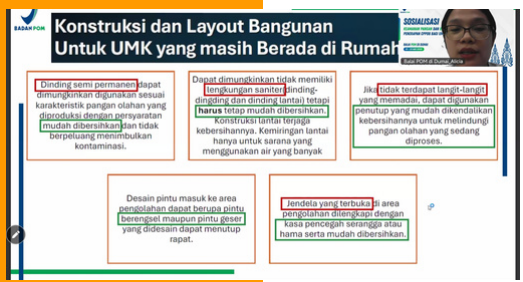
21 Mei 2025

Balai POM di Dumai mengadakan kegiatan Bimbingan teknis "Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)" untuk UMK Pangan Olahan yang dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 21 - 23 Mei 2025 secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan ini dilakukan untuk mendampingi pelaku usaha UMK dalam hal pemahaman regulasi agar dapat naik kelas, legal, dan mampu menembus pasar yang lebih luas—baik nasional maupun ekspor. Kegiatan ini juga merupakan salah satu tahapan dari Program Nasional Pendampingan UMK Pangan Olahan oleh Badan POM RI di setiap Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia

Kegiatan dihadiri oleh 14 pelaku usaha, terdiri dari 8 sarana produksi mikro kecil dan 3 sarana produksi menengah besar. Dalam kesempatan ini, disampaikan beberapa materi oleh petugas Balai POM di Dumai, terkait penerapan CPPOB di lingkungan produksi pangan olahan dan memberikan pemahaman mengenai proses perizinan pangan olahan dan OSS berbasis risiko , dan persyaratan sertifikasi dan perizinan guna memperluas pasar dan legalitas produk.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan meningkatkan pengetahuan pelaku UMK dalam memenuhi persyaratan sertifikasi hingga perizinan guna memperluas pasar dan legalitas produk.











SEDAP MALAM

Pendampingan dan Pembinaan ke Pelaku Usaha UMKM

27 Mei 2025

Pada tanggal (27/05) Petugas Balai POM di Dumai melakukan program SEDAP MALAM (Sistem Pendampingan dan Pembinaan bagi Komunitas dan pelaku usaha UMKM) di wilayah Dumai wakkk. Petugas mendatangi UMKM Pangan Olahan dan melakukan pembinaan secara langsung terkait pemenuhan aspek Cara Produk Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dari SOP Formulir, manual mutu dan pembuatan akun e-sertifikasi.

Tindak lanjut dari program pendampingan ini, pelaku usaha diharapkan siap dan berkomitmen dalam menerapkan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) salah satu persyaratan pendaftaran Nomor Izin Edar BPOM.

INFOPOM

(Informasi Seputar Obat dan Makanan)

27 Mei 2025

Selasa (27/05), Petugas Balai POM di Dumai melakukan edukasi melalui update informasi di Mading INFOPOM (Informasi Seputar Obat dan Makanan) di seluruh Puskesmas Kota Dumai. dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional.

Selain itu, petugas juga memberikan edukasi kepada pengunjung puskesmas secara langsung terkait informasi Jamu. Pengunjung tampak antusias dengan adanya INFOPOM pada puskesmas di Kota Dumai.

Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Jamu.





JUNI 2025

UPACARA

PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2025

20 Mei 2025



Kepala Balai POM di Dumai Melakukan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Senin (02/06) Kepala Balai POM di Dumai menghadiri upacara peringatan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di Lapangan Bukit Gelanggang Kota Dumai.

Upacara ini dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Dumai, Sugiyarto sebagai inspektur upacara dan dihadiri oleh FORKOPIMDA, Instansi vertikal dan Instansi pemerintah daerah Kota Dumai.

Dalam amanatnya, Wakil Walikota menyampaikan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia di sampaikan bahwa "BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program stategis : dari pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan aparat negara, penguatan kurikulum pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengarusutamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat.

Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif uang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi pengingat bahwa bukan sekadar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai - nilai luhur bangsa. "







PENGAWASAN

Sarana Produksi

Juni 2025

Dalam rangka memonitor penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), pada tanggal 02, 11, dan 18 Juni, Petugas Balai POM di Dumai melakukan kegiatan pengawasan pada sarana produksi pangan olahan di Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis.

Petugas melakukan pemeriksaan mulai dari dokumen, area produksi, dan proses produksi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada 5 sarana produksi mendapatkan hasil sarana 2 tidak memenuhi ketentuan dan 3 sarana memenuhi ketentuan.

Diharapkan dengan adanya pengawasan rutin ini memastikan produsen pangan olahan menerapkan aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sehingga pangan olahan yang diproduksi terjamin mutu dan kualitasnya.

PENGAWASAN

Sarana Distribusi dan SARYANFAR

Juni 2025

Pada tanggal 03, 04, 11, 12, 13, 18, 19, dan 20 Juni 2025, Petugas Balai POM di Dumai melakukan pengawasan pada sarana distribusi sarana pelayanan kefarmasian (SARYANFAR) di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin keamanan mutu obat dan makanan.

Pada SARYANFAR, petugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan obat meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan dan pendistribusian, pengembalian, pencatatan dan pelaporan, serta pemusnahan obat.

Pemeriksaan dilakukan pada 11 sarana distribusi, didapatkan hasil bahwa 3 sarana memenuhi ketentuan dan 8 sarana tidak memenuhi ketentuan. Diharapkan dengan adanya pengawasan sarana distribusi ini, pemilik toko dan pembeli selalu menerapkan CEK KLIK saat menjual dan membeli barang.







RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai POM di Dumai sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, stakeholder dan masyarakat dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagaimanan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan upaya yang dilakukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Balai POM di Dumai telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 terutama menyangkut kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program pada tahun 2025.

Untuk mendukung rencana kinerja tersebut, Balai POM di Dumai menetapkan 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dengan 24 (Dua Puluh Empat) Indikator Kinerja Utama yang keseluruhannya telah diperjanjikan antara Kepala Balai POM Dumai dengan Kepala Badan POM.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Dumai terdapat 9 Sasaran Strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
3. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
4. Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
5. Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja UPT
7. Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejatahan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
8. Layanan Publik UPT yang Prima

9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 24 Indikator Kinerja Utama Balai POM di Dumai tahun 2025 adalah sebagai berikut: 10 Indikator Kinerja Utama tercapai dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan", 7 Indikator Kinerja Utama teracapai dengan kriteria "Sangat Baik", 1 Indikator Kinerja Utama tercapai dengan kriteria "Baik", serta 6 Indikator Kinerja Utama yang belum ada target dan capaian hingga triwulan II. Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Dumai tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing sasaran strategis dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai POM di Dumai Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar **105,73%** dengan kriteria "**Istimewa**".

Balai POM di Dumai pada tahun 2025 memperoleh anggaran sesuai SP: DIPA – 063.01.2.672849/2025 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp15.768.463.000. Pada Tahun 2025, menindaklanjut Inpres 1 tahun 2025, total anggaran Balai POM di Dumai yang diblokir sebesar Rp12.080.523.000.

Realisasi anggaran Balai POM di Dumai sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.601.792.833 dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 10,03% dengan pagu anggaran Automatic Adjustment tahun 2025. Jika tanpa Automatic Adjustment maka realisasi anggaran Balai POM di Dumai adalah 41,25%.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja triwulan I tahun 2025, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

1. Melakukan perencanaan kembali terkait target produk sampel Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam Pelaksanaan Sampling;
2. Melakukan perencanaan kembali dalam Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
3. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), terutama untuk IKU yang menjadi baseline pada perencanaan strategis Balai POM di Dumai;

4. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2025;
5. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dan stakeholder terkait Tindak Lanjut Surat Rekomendasi yang dikirimkan;
6. Meningkatkan koordinasi dengan Balai – Balai Regionalisasi Laboratorium dalam rangka pengujian sampel;
7. Mengawal realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan dengan melakukan Rapat Internal.

Dumai, 18 Juli 025
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Dumai



Emi Amalia, S.Farm.,Apt,M.Sc

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF i

DAFTAR ISI 4

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1 LATAR BELAKANG 5

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 6

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 8

1.4 ISU STRATEGIS 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS 15

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 15

2.3 PERJANJIAN KINERJA 20

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 22

2.5 METODE PENGUKURAN 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 24

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 89

3.3 REALISASI ANGGARAN 97

BAB IV PENUTUP 106

a. KESIMPULAN 106

b. REKOMENDASI YANG DAPAT DILAKUKAN DITAHUN BERIKUTNYA 1077

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk mengetahui kemampuandalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder yang dituangkan melalui suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Balai POM di Dumai sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, yang dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja setiap tahunnya sesuai dengan amanat pada Peraturan Presidean Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pertanggungjawaban. Penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Dumai Tahun 2025 merujuk kepada Rencana Strategis Balai POM di Dumai tahun 2025 - 2029 serta Perjanjian Kinerja Balai POM di Dumai tahun 2025.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup masyarakat telah mendorong peningkatan konsumsi produk obat dan makanan secara signifikan. Masyarakat kini semakin mudah mengakses informasi mengenai obat dan makanan melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial. Namun, di sisi lain, literasi masyarakat terhadap keamanan, khasiat, dan mutu produk yang mereka konsumsi masih belum optimal. Hal ini menyebabkan masih banyak ditemukan penggunaan obat dan makanan yang tidak tepat, tidak aman, dan berisiko bagi kesehatan.

Fenomena maraknya iklan dan promosi—baik secara konvensional maupun digital—juga turut mendorong pola konsumsi yang kurang bijak. Produk-produk dengan klaim berlebihan, penggunaan bahan yang tidak sesuai standar, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi keamanan pangan dan obat menjadi tantangan yang perlu diatasi. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi produksi, sistem perdagangan global, dan tren konsumsi yang terus berkembang, risiko terhadap kesehatan masyarakat pun meningkat. Jika tidak diawasi dengan ketat, peredaran produk substandar, rusak, atau terkontaminasi bahan berbahaya dapat memberikan dampak luas dan cepat terhadap kesehatan masyarakat.

Sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Balai POM di Dumai memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di wilayahnya memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang telah ditetapkan. Dengan cakupan pengawasan yang meliputi Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir, Loka POM bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan pre-market dan post-market untuk melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendorong daya saing industri farmasi dan pangan nasional.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Per BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Dumai sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai POM di Dumai menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BPOM memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia melalui pengawasan terhadap obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kawasan perbatasan. Dalam penguatan sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam Asta Cita, yang mencakup pembangunan sistem ketahanan kesehatan nasional dan perlindungan terhadap rakyat dari produk berbahaya. Wilayah perbatasan, termasuk Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis yang berbatasan langsung dengan jalur

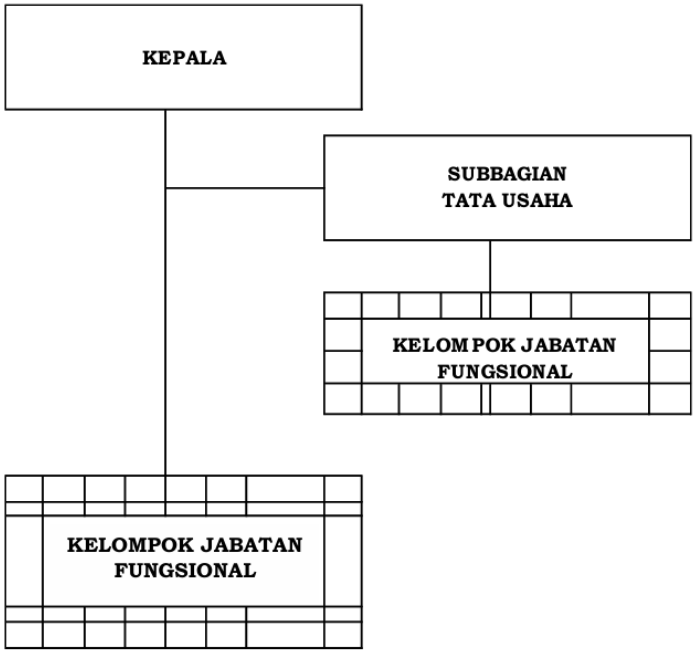
perdagangan internasional Selat Malaka, menjadi titik strategis yang harus diawasi secara ketat.

Sebagai salah satu gerbang perdagangan Indonesia, kawasan ini memiliki banyak pelabuhan yang digunakan untuk ekspor-impor, termasuk pelabuhan rakyat yang berpotensi menjadi jalur masuk produk ilegal. Keberadaan Balai POM di Dumai menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa produk yang masuk dan beredar di wilayah ini memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan kebijakan nasional dalam membangun kedaulatan pangan serta ketahanan kesehatan, Balai POM di Dumai terus memperkuat sistem pengawasan dengan menerapkan strategi berbasis risiko, meningkatkan kerja sama lintas sektor, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan. Selain itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu prioritas utama guna menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya memilih dan menggunakan obat serta makanan yang aman dan bermutu.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Per BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Dumai secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM. Balai POM di Dumai merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM dipimpin oleh Kepala Balai. Struktur organisasi Balai POM terdiri dari Kepala Balai, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Adapun struktur organisasi Balai POM di Dumai digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan

1.4 ISU STRATEGIS

Memiliki wilayah kerja yang berada pada kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Balai POM di Dumai dihadapkan pada serangkaian isu strategis yang kompleks dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Obat dan Makanan. Wilayah yang strategis memperkuat urgensi dalam menangani tantangan-tantangan berikut:

a. Balai POM di Dumai berdiri sebagai garda terdepan dalam memastikan produk Obat dan Makanan yang beredar di pasaran aman bagi konsumen. Namun, wilayah perbatasan yang bersentuhan langsung dengan negara tetangga membawa sejumlah permasalahan krusial yang tak boleh diabaikan. Seperti ancaman dari perdagangan gelap obat-obatan dan makanan ilegal menjadi momok yang mengintai. Jalur-jalur tikus yang menghubungkan wilayah perbatasan menjadi jalur penyelundupan barang-barang ilegal, termasuk obat-obatan dan makanan yang tidak memiliki izin edar atau telah kedaluwarsa. Hal ini mengundang bahaya serius bagi kesehatan masyarakat, mengingat produk-produk ilegal ini seringkali tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Wilayah perbatasan cenderung rentan terhadap penyebaran produk Obat dan Makanan ilegal, terutama karena adanya

arus perdagangan yang aktif dan mobilitas penduduk yang tinggi. Oleh karena itu, Balai POM di Dumai harus mampu mengidentifikasi, mengisolasi, dan mengendalikan risiko penyebaran produk obat dan makanan dengan cepat dan efektif.

b. Selain maraknya peredaran obat dan makanan illegal, masih terdapat peredaran obat dan makanan palsu yang sulit dideteksi karena kemiripan dengan produk asli. Hal ini juga didukung dengan maraknya penjualan obat dan makanan melalui platform digital yang sulit diawasi.
c. Tantangan dalam hal kerja sama lintas batas dengan lintas sektor terkait menjadi esensial. Perbedaan regulasi, prosedur, dan kebijakan yang kompleks seringkali menjadi kendala dalam pengawasan. Pengawasan obat dan makanan memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, asosiasi, media, dan institusi pendidikan. Membangun dan mempertahankan kerja sama yang efektif dengan berbagai sektor ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pengawasan yang komprehensif.
d. Balai POM di Dumai harus mampu terus berupaya meningkatkan kapasitas internalnya dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, anggaran dan teknologi guna mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan strategi yang kokoh dan kerja keras yang berkelanjutan, Balai POM di Dumai diharapkan dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi kesehatan masyarakat dalam menghadapi dinamika perdagangan obat dan makanan di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
e. Perkembangan UMKM di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir juga menuntut Balai POM di Dumai memiliki strategi khusus yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan registrasi namun juga tidak melupakan faktor keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang diproduksi.
f. Banyak masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran dalam melalukan pengecekan izin edar dan keamanan produk yang mereka konsumsi. Sehingga diperlukan peningkatan pemahaman bagi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dapat dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Balai POM di Dumai.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai POM di Dumai sebagai UPT BPOM dalam rangka melaksanakan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2022-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Dumai perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

a. Isu Internal

Balai POM di Dumai memiliki serangkaian isu internal yang kompleks yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah perbatasan. Beberapa isu yang muncul terkait dengan keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, dan kebutuhan mendasar untuk memperkuat infrastruktur pendukung adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

   Balai POM di Dumai menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan jumlah petugas maupun terkait belum meratanya kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Dengan wilayah kerja yang luas dan terbagi dalam 3 (tiga) pulau yakni Pulau Sumatera, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat, dan banyaknya produk yang diawasi keterbatasan jumlah petugas yang tersedia dan tidak meratanya kompetensi petugas menjadi tantangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara merata, menyeluruh dan efektif.

2. Keterbatasan Sarana Prasarana

   Infrastruktur yang terbatas di wilayah perbatasan, terutama dalam hal transportasi dan aksesibilitas, menjadi tantangan dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif. Terbatasnya kendaraan operasional (hanya terdapat 1 (satu) mobil operasional berupa mobil laboratorium), Balai POM di Dumai kesulitan untuk mencapai lokasi-lokasi terpencil dengan cepat dan efisien serta kesulitan untuk merespons dengan cepat terhadap laporan atau kejadian yang memerlukan tindakan segera.

3. Keterbatasan Anggaran

   Terbatasnya anggaran menyebabkan terbatasnya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Dumai terutama untuk dapat menjangkau wilayah diperbatasan negara yang jaraknya cukup jauh dari Kota Dumai.

4. Belum memiliki gedung kantor yang memadai

   Keterbatas ruang Gedung dan Bangunan yang digunakan sebagai tempat operasional kantor Balai POM di Dumai belum memadai. Hal ini berpengaruh terhadap nilai Kepuasan Masyarakat dimana Masyarakat belum merasa puas dan nyaman dengan kondisi kantro Balai POM di Dumai karena tidak tersedianya halaman parkir yang belum memadai.

5. Belum memiliki laboratorium pengujian

   Karena belum memiliki laboratorium, Balai POM di Dumai harus mengirimkan sampel ke laboratorium ke UPT lain di Badan POM sehingga memperpanjang waktu dan biaya untuk mendapatkan hasil pengujian. Hal ini juga menyebabkan Balai POM di Dumai belum dapat memenuhi permintaan pihak ketiga atas pengujian sampel pihak ketiga.

6. Koordinasi Internal

   Kurangnya koordinasi internal antar fungsi-fungsi di dalam Balai POM di Dumai dapat menghambat aliran informasi yang efektif dan berdampak pada konsistensi dalam penegakan aturan dan kebijakan.

Menghadapi isu-isu internal ini, Balai POM di Dumai perlu mengidentifikasi prioritas, mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana dan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitasnya dalam melaksanakan tugas pengawasan termasuk peningkatan investasi dalam peningkatan dan pemerataan kompetensi petugas, pemenuhan infrastruktur sarana dan prasarana, serta upaya untuk memperoleh fasilitas laboratorium. Kerja sama dengan pihak lain seperti pemerintah daerah, lembaga internasional, dan sektor swasta juga dapat membantu mengatasi keterbatasan yang dihadapi. Dengan demikian, Balai POM di Dumai diharapkan dapat meningkatkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah perbatasan dengan lebih efektif dan efisien.

b. Isu Eksternal

Balai POM di Dumai menghadapi sejumlah isu eksternal yang signifikan yang memengaruhi efektivitasnya dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayahnya. Berikut adalah contoh narasi mengenai isu-isu tersebut:

1. Maraknya Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

   Era revolusi industri 4.0 yang menekankan pada pola digital economy, big data, robotic, dsb sehingga mempengaruhi pola distribusi produk secara online. Beredarnya produk obat dan makanan ilegal, substandar dan/atau mengandung bahan berbahaya melalui jalur perdagangan online dan informasi/ promosi produk cenderung menyesatkan.Fenomena maraknya penjualan produk obat dan makanan secara online yang cenderung sulit diawasi, berkembang dengan cepat dan sulit diidentifikasi, menuntut peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan online serta meningkatkan kerja sama dengan platform *online* dan aparat penegak hukum untuk menangani masalah ini.

2. Kondisi Geografis di Wilayah Perbatasan

   Kondisi geografis yang unik di wilayah perbatasan,seperti hutan belantara atau akses terbatas ke beberapa daerah terpencil,menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Mobilitas yang terbatas dan akses yang sulit untuk dijangkau oleh petugas, memungkinkan peredaran produk ilegal atau tidak aman tanpa terdeteksi petugas. Ini menuntut strategi yang inovatif dan adaptif dalam melakukan inspeksi dan pemantauan di wilayah perbatasan. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia sehingga menyebabkan tingginya permintaan produk yang didukung dengan kemudahan akses masuk produk luar negeri ke Indonesia.

3. Infrastruktur yang Terbatas.

   Infrastruktur yang terbatas di wilayah perbatasan menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap peredaran obat dan makanan. Akses yang sulit ke beberapa daerah terpencil dapat menghambat upaya pembinaan dan pengawasan produk Obat dan Makanan kepada masyarakat.

4. Rendahnya pemahaman lintas sektor terhadap implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018.

Tingkat pemahaman yang rendah dari lintas sektor dan pelaku usaha terkait regulasi obat dan makanan menjadi hambatan serius dalam penerapan kebijakan dan peraturan. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dapat menyebabkan penyebaran produk ilegal atau tidak aman di pasaran. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait regulasi obat dan makanan.

5. Rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil pemeriksaan oleh petugas (pembuatan CAPA).

Dalam menghadapi isu-isu eksternal ini, BPOM Dumai perlu mengambil pendekatan yang komprehensif dan berbasis kerjasama. Ini melibatkan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk pimpinan daerah, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayahnya. Selain itu, peningkatan kapasitas dalam pengawasan online, pemahaman lintas sektor, dan pemantauan kondisi geografis juga sangat penting untuk memastikan keamanan produk obat dan makanan bagi masyarakat

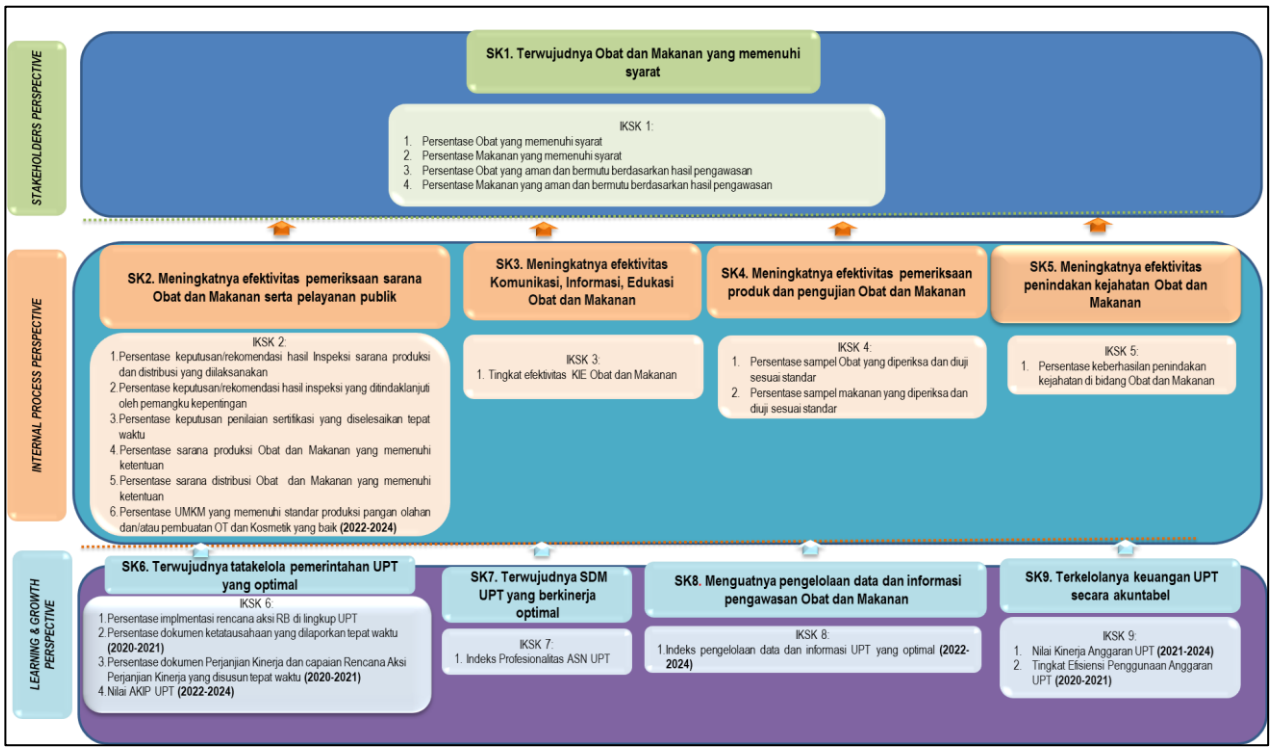
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Balai POM di Dumai untuk periode 2025-2029.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Dumai akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Dumai sebagai berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategis Balai POM di Dumai Tahun 2025-2029

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan menghubungkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Dumai Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Dumai Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Olahan di wilayah kerja UPT		
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95,1
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	88
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	78,23
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang Memenuhi Ekspektasi, transparan dan akuntabel yang berorientasi hasil, Kepala Balai POM di Dumai menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang memuat sasaran strategis beserta indikator yang relevan dengan target yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Balai POM di Dumai tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2025 yang berlaku pada periode Januari sampai dengan Desember 2025.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Dumai Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	81.25
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	75,00
		Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94,06
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,38

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,62
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60,00
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,83
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91,00
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95,00
7	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejatahan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	90,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
8	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	78,00
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,7
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Dumai dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi SIMETRIS *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pada triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Dumai Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	81,25	81,25	81,25	81,25	145.716.000
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	75,00	75,00	75,00	75,00	97.110.500
		Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	5.340.100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang	85,00	85,00	85,00	85,00	21.360.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	45,00				80.996.250
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	90,00	90,00	90,00	31.145.875
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	90,00	90,00	90,00	31.145.875
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.38	93.38	93.38	93.38	78.272.250
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	85,00	85,00	78.272.250
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,62	87,62	87,62	87,62	15.570.000
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10,00				10.492.500

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8	9	10	11	11.566.262.000
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,83	85,83	85,83	85,83	108.018.750
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	25,00				93.882.000
		Jumlah desa pangan aman	27,00				152.589.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	30,00				100.386.000
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10,00	30,00	70,00	91,00	12.390.750
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	45,00	95,00	107.821.000
7	Terlaksananya Kegiatan Deteksi	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	50,00	50,00	50,00	90,00	75.570.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	Kejatahan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar					
8	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	3,75	140.026.500
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	78,00	49.750.000
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	5	2.671.875.000
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	2,70	49.750.000
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	25,00	50,00	75,00	100,00	49.750.000

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus.

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya,semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk menghitung capaian sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator digunakan pembobotan yang sama untuk masing-masing indikator dengan rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Nilai pencapaian sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikator (NPI) dikalikan dengan bobot 1.

$$\text{NPS}_2 = \frac{1\ NPI1 + 1\ NPI2}{2} \qquad \text{NPS}_4 = \frac{1\ NPI1 + 1\ NPI2 + 1\ NPI3 + 1\ NPI4}{4}$$

$$\text{NPS}_3 = \frac{1\ NPI1 + 1\ NPI2 + 1\ NPI3}{3} \qquad \text{NPS}_5 = \frac{1\ NPI1 + 1\ NPI2 + 1\ NPI3 + 1\ NPI4 + 1\ NPI5}{5}$$

NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:

$$\text{NPSS} = \Sigma \text{ NP} / \Sigma \text{ P}$$

Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Gambar 2.2 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$\mathbf{IE} = \frac{\%\ \boldsymbol{CapaianOutput}}{\%\ \mathbf{RencanaCapaianinput}} \mathbf{IE} = \frac{100\ \%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$\mathbf{TE} = \frac{\mathbf{IE} - \mathbf{SE}}{\mathbf{SE}}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Balai POM di Dumai guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan saat ini dengan triwulan sebelumnya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta analisis rekomendasi perbaikan kinerja untuk selanjutnya.

NKO merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi.

Berdasarkan aplikasi *e-performance* pada Sistem Informasi BPOM (SIMETRIS) yang merupakan aplikasi kinerja yang diimplementasikan di seluruh UPT Badan POM termasuk Balai POM di Dumai, diperoleh nilai **NKO Total** sebesar **105,73%** dengan kriteria **"Istimewa".**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
				Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	81,25	93,96	115,64	Normalisasi	110,00%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	75,00	99,26	132,35	Normalisasi	110,00%
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Juni	100,00	0,00	0,00	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85,00	94,00	110,59	Normalisasi	110,00%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Juni	45,00	67,84	150,76	Normalisasi	110,00%
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	90,00	100,00	111,11	Normalisasi	110,00%

7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	90,00	100,00	111,11	Normalisasi	110,00%
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	93,38	98,06	105,01	-	105,01%
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85,00	99,17	116,67	Normalisasi	110,00%
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Juni	87,62	99,72	113,81	Normalisasi	110,00%
11	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	30,00	30,00	100,00	-	100,00%
12	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Juni	9,00	9,22	102,44	-	102,44%
13	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Juni	85,83	88,41	103,01	-	103,01%

14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Juni	25,00	75,00	300,00	Normalisasi	110,00%
15	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	Juni	27,00	25,00	92,59	-	92,59%
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Juni	75,00	75,00	100,00	-	100,00%
17	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Juni	30,00	65,75	219,17	Normalisasi	110,00%
18	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Juni	0,00	0,00	0,00	-	
19	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Juni	50,00	50,00	100,00	-	100,00%
20	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Juni	0,00	-	0,00	-	
21	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	Juni	0,00	-	0,00	-	

22	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Juni	0,00	-	0,00	-	
23	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Juni	0,00		0,00		
24	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Implementasi RB	Juni	50,00	50,00	100,00	-	100,00%
							Total Capaian PK	1903,05%
							Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK	105,73%
							Predikat NKO	Istimewa

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 9 sasaran strategis dan 24 indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81,25	93,96	115,64%	**Tidak Dapat Disimpulkan**
		2	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00	99,26	132,35%	**Tidak Dapat Disimpulkan**
		3	Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00	-
		4	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00	94,00	110,59%	**Tidak Dapat Disimpulkan**
		5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	45,00	67,84	150,76%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	100,00	111,11%	**Tidak Dapat Disimpulkan**
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	100,00	111,11%	**Tidak Dapat Disimpulkan**
		8	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,38	98,06	105,01%	**Sangat Baik**
		9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	99,17	116,67%	**Tidak Dapat Disimpulkan**
		10	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,62	99,72	113,81%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	30,00	30,00	100,00%	**Sangat Baik**
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9,00	9,22	102,44%	**Sangat Baik**
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,83	88,41	103,01%	**Sangat Baik**
		2	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	25,00	75,00	300,00%	**Tidak Dapat Disimpulkan**
		3	Jumlah desa pangan aman	27,00	25,00	92,59%	**Baik**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75,00	75,00	100,00%	**Sangat Baik**
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	30,00	65,75	219,17%	**Tidak Dapat Disimpulkan**
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0,00	0,00	0,00	-
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan	1	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	50,00	50,00	100,00%	**Sangat Baik**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif						
8	Layanan Publik UPT yang Prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		-	0,00	-
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	1	Nilai AKIP UPT BPOM		-	0,00	-
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		-	0,00	-
		3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			0,00	-
		4	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	50,00	50,00	100,00%	**Sangat Baik**

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sediaan farmasi mencakup Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81,25	93,96	115,64%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 93,96, diperoleh dari 136 sampel Sediaan Farmasi yang diperiksa oleh Balai POM di Dumai dan diuji oleh BBPOM di Pekanbaru dan Balai Regionalisasi Lab. Capaian indikator berikut sebesar 115,64% dengan kategori capaian "Tidak Dapat Disimpulkan".

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81,25	93,96	115,64% ▲ Tercapai

Realisasi Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target tahun 2025 dengan kriteria "Tercapai".

Pada saat desk Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Dumai 2025 – 2029, Balai POM di Dumai telah mengajukan kenaikan target kinerja untuk tahun 2025 – 2026 dari kesepakatan awal untuk menyesuaikan persentase capaian kinerja agar tidak melebihi 110%. Sehingga Balai POM di Dumai akan melakukan revisi target kinerja sekaligus revisi RAPK bulanan tahun 2025.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Hingga triwulan II tahun 2025, telah dilakukan sampling terhadap produk Sediaan Farmasi sebanyak 136 sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Kuasi.

Keberhasilan peningkatan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan yakni :

- Perencanaan sampling yang telah disusun diawal tahun;
- Kesesuaian Pelaksanaan sampel dengan Target Sampel dan Renlak Kategori Sampel sudah 100% sesuai dengan Pedoman Sampel;
- Evaluasi penandaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman;
- Akurasi dalam penentuan Kesimpulan Penandaan Sampel sudah sesuai dengan Pedoman Sampel;
- Kesesuaian Paramater Uji sudah sesuai dengan Pedoman Sampling;
- Surat Pengawasan Produk yang dikirimkan oleh Pusat telah ditindaklanjuti oleh Balai POM di Dumai.

Namun, terdapat beberapa komponen pada perhitungan realisasi Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar belum optimal disebabkan oleh:

- Kelengkapan Laporan dan Ketepatan Waktu untuk Pengambilan Sampel, Pengujian, dan Pelaporan pada sampel Obat Bahan Alam (OBA), Suplemen Kesehatan (SK) dan Kosmetik belum tepat waktu. Hal ini dikarenakan masih terdapat hasil pengujian yang baru keluar setelah lewat dari timeline SLA Pengujian.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian kinerja

Pencapaian yang maksimal pada indikator Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar didukung terlaksanannya kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengadaan Sampel Sediaan Farmasi yang sesuai dengan Pedoman Sampling masing – masing komoditi yang telah ditetapkan;
b. Pelaksanaan Pengujian Rapid Test Sampel Obat sesuai dengan kategori sampel yang ditentukan;
c. Peningkatan kompetensi pegawai Balai POM di Dumai dengan mengikuti pelatihan Sampel melalui IDEAS.

2. Persentase Pangan Olahan dalam Kemasan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

a. kesesuaian target sampel UPT;
b. kesesuaian parameter uji;
c. ketepatan pengambilan kesimpulan;
d. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan

e. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00	99,26	132,35%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 99,26 diperoleh dari 45 sampel produk Pangan Olahan diperiksa oleh Balai POM di Dumai dan diuji oleh BBPOM di Pekanbaru dan Balai Regionalisasi Lab. Capaian indikator berikut sebesar 132,35% dengan kategori capaian "Tidak Dapat Disimpulkan".

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00	99,26	132,35% ▲ Tercapai

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Tercapai" karena capaiannya telah melebihi target tahunan 2025 Balai POM di Dumai.

Pada saat desk Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Dumai 2025 – 2029, Balai POM di Dumai telah mengajukan kenaikan target kinerja untuk tahun 2025 – 2026 dari kesepakatan awal untuk menyesuaikan persentase capaian kinerja agar tidak melebihi 110%. Sehingga Balai POM di Dumai akan melakukan revisi target kinerja sekaligus revisi RAPK bulanan tahun 2025.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegiatan sampling Produk Pangan Olahan triwulan II tahun 2025 telah dilakukan dengan baik sesuai perencanaan dengan realisasi sebanyak 45 sampel.

Keberhasilan peningkatan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan yakni :

- Perencanaan sampling yang telah disusun diawal tahun;
- Kelengkapan Laporan dan Ketepatan Waktu untuk Pengambilan Sampel, Pengujian, dan Pelaporan sampel Pangan belum 100%, dikarenakan terdapat 19 SLA Pengujian sampel pangan yang lebih dari 15 HK.
- Kesesuaian Pelaksanaan sampel dengan Target Sampel dan Renlak Kategori Sampel sudah 100% sesuai dengan Pedoman Sampel;
- Evaluasi penandaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman;
- Akurasi dalam penentuan Kesimpulan Penandaan Sampel sudah sesuai dengan Pedoman Sampel;
- Kesesuaian Paramater Uji sudah sesuai dengan Pedoman Sampling;
- Surat Pengawasan Produk yang dikirimkan oleh Pusat telah ditindaklanjuti oleh Balai POM di Dumai.

Namun, terjadi penurunan pasa realisasi kinerja yang disebabkan oleh terdapat 1 sampel pangan olahan Minyak Goreng yang tidak dapat dilakukan pengujian oleh Balai Penguji karena ketidaktersediaan reagen untuk pelaksanaan pengujiannya.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian yang maksimal pada indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat didukung terlaksanannya kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengadaan Sampel Pangan Olahan yang sesuai dengan Pedoman Sampling masing – masing komoditi yang telah ditetapkan;
b. Peningkatan kompetensi pegawai Balai POM di Dumai dengan mengikuti pelatihan Sampel melalui IDEAS.

3. Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00	-

Hingga triwulan II, Balai POM di Dumai belum menerima sampel pangan dari KLB KP yang terjadi di wilayah kerja Balai POM di Dumai sehingga perhitungan capaian IKU tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk NKO Balai POM di Dumai.

4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	94,00	110,59%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 94,00 dan Capaian indikator berikut sebesar 110,59 dengan kategori capaian "Tidak Dapat Disimpulkan".

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	94,00	110,59% ▲ Tercapai

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Tercapai" karena capaiannya telah melebihi target tahunan 2025 Balai POM di Dumai.

Berdasarkan surat dari Plt. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan nomor T-PW.04.03.54.07.25.1121 tentang Evaluasi Pengawasan PIRT Triwulan I, terdapat ketidaksesuain pada poin:

a. Kesesuaian Parameter Uji : Terdapat 2 sampel yang Pengambilan kesimpulan hasil uji masih memperhitungkan hasil kesimpulan label. Seharusnya MS. Sesuai dengan Pedoman Sampling TA 2025, kesimpulan pengawasan Label Tidak mempengaruhi Kesimpulan Hasil Uji
b. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan : Terdapat 10 sampel yang Parameter Uji hanya 2 Kimia dan 1 Mikro. Sesuai pedoman sampling 3 Kimia dan 1 Mikro.

Sehingga berdasarkan penilaian Unit Pengampu capaian IKU berikut hanya 76%. Atas rekomendasi dari Unit Pengampu, terhadap kesalahan pengambilan kesimpulan telah ditindaklanjuti oleh BBPOM di Pekanbaru sebagai Balai Penguji kepada ITSM Pusdatin untuk mengkonfirmasi atas kesalahan penginputan hasil uji pada SIPT. Serta untuk kesesuaian parameter uji masih dilakukan konfirmasi dan justifikasi atas ketidaksesuaian parameter tersebut kepada BBPOM di Pekanbaru sebagai Balai Penguji

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- Terdapat 5 sampel PIRT yang tidak sesuai dengan Renlak Kategori sampel triwulan I. Namun, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Unit Pengampu, 3 sampel PIRT dapat disetujui sesuai dengan kategori sampel.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung terlaksanannya kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- Ketepatan waktu pengambilan sampel sudah sesuai dengan timeline Pelaksanaan Sampel;
- Ketapatan waktu pelaporan sudah tepat waktu sesuai dengan batas waktu pelaporan.

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	45,00	67,84	150,76%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 67,84 dan Capaian indikator berikut sebesar 150,76% dengan kategori capaian “Tidak Dapat Siaimpulkan”.

Untuk menindaklanjuti persentase capaian kinerja yang melebihi 110%, Balai POM di Dumai akan mengajukan revisi target bulanan RAPK kepada Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan Agustus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk target B08 – B11 tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94,06	67,84	72,12% Akan Tercapai

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Akan Tercapai" karena belum mencapai target tahunan 2025 Balai POM di Dumai.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- Masih terdapat 5 Surat Rekomendasi kepada pelaku usaha yang belum mendapatkan *feedback* serta 2 Surat Rekomendasi kepada Lintas Sektor yang belum mendapatkan *feedback.*

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder didukung terlaksanannya kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring *feedback* tindak lanjut yang ditujukan kepada pelaku usaha dan lintas sektor secara berkala.
2. Petugas membuat *timeline* penagihan CAPA dan berkomunikasi secara aktif dengan *stakeholder* / pelaku usaha untuk penyelesaian CAPA dengan memberikan *contact person* untuk kemudahan akses konsultasi dan pendampingan.

6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit);
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan;
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100,00 dan Capaian indikator berikut sebesar 111,11% dengan kategori capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11% ▲ Tercapai

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Tercapai" karena capaiannya telah melebihi target tahunan 2025 Balai POM di Dumai.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah dilaksanakan pada triwulan II, Balai POM di Dumai telah memeriksan 1 sarana produksi Obat Bahan Alam sesuai dengan target dan perencanaan yang ditetapkan serta hasil pemeriksaan telah dilaporkan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai didukung dengan :

1. Penyesuaian perencaan pemeriksaan sarana produksi
2. Melakukan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan dan tepat waktu

7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100,00 dan Capaian indikator berikut sebesar 111,11% dengan kategori capaian "Tidak Dapat Disimpulkan".

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11% ▲ Tercapai

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Tercapai" karena capaiannya telah melebihi target tahunan 2025 Balai POM di Dumai.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah dilaksanakan pada triwulan II, Balai POM di Dumai telah memeriksan 15 sarana produksi Pangan Olahan sesuai dengan target dan perencanaan yang ditetapkan serta hasil pemeriksaan telah dilaporkan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai didukung dengan :

3. Penyesuaian perencaan pemeriksaan sarana produksi
4. Melakukan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan dan tepat waktu

8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenaangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,38	98,06	105,01%	**Sangat Baik**

Realisasi Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 98,06 dan Capaian indikator berikut sebesar 105,01% dengan kategori capaian “Sangat Baik”.

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,38	98,06	105,01% ▲ Tercapai

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam “Tercapai” karena telah mencapai target tahunan 2025 Balai POM di Dumai.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Balai POM di Dumai telah melakukan pemeriksaan 45 sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan rencana pemeriksaan. Hasil inspeksi tersebut telah dilaporan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai dengan timeline yang ditetapkan.

Namun terdapat beberapa hal yang menyebabkan capaian indicator ini tidak optimal diantaranya:

- Terdapat 1 hasil pemeriksaan sarana distribusi obat yang dilaporkan tidak sesuai dengan hasil reviu tindaklanjut supervisor.
- Berdasarkan hasil reviu dari Unit Pengampu, pada Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat sarana distribusi kosmetik terdapat 2 sarana yang tidak dilengkapi oleh BAP hasil pengawasan. Hal ini disebabkan oleh, aplikasi SIPT yang sering mengalami eror sehingga data dukung yang telah diinput oleh petugas tidak masuk secara lengkap hingga data tersebut dikirimkan ke supervisor.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tercapainya indikator ini ditunjang oleh beberapa kegiatan yaitu:

1. Penyusunan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi sesuai dengan analisa risiko yang ditetapkan
2. Melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai dengan pedoma teknis pemeriksaan yang telah ditetapkan
3. Melaporkan hasil pemeriksanaan sarana dengan lengkap dan tepat waktu
4. Melakukan diskusi kepada anggota tim jika terdapat kendala pada saat pemeriksaan maupun pada saat penentuan surat tidanlanjut yang akan diberikan sesuai hasil pemeriksaan

9. Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa;
2. Ketepatan waktu pelaporan;
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00	99,17	116,67%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah 100,00 dan Capaian indikator berikut sebesar 116,67% dengan kategori capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00	99,17	116,67%  Tercapai

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Tercapai" karena telah mencapai target tahunan 2025 Balai POM di Dumai.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan telah mencapai target kinerja triwulan II dikarenakan:

- Telah memeriksan 15 sarana Pangan Olahan sesuai dengan Renlak Pengawasan
- Telah menyelesaikan 15 Surat Tindak Lanjut atas pemeriksaan sarana tersebut

Namun terdapat beberapa hal yang menyebabkan capaian indicator ini tidak optimal yaiut

- Terdapat Tersapat 2 sarana yang tidak dilaporkan tepat waktu,. Hal ini disebabkan karena pelaporan pada aplikasi SIPT dilaporkan lewat dari timeline pelaporan karena petugas kurang teliti dalam mengirimkan hasil pemeriksaan.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan didukung dengan kegiatan:

- Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Olahan sesuai dengan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan
- Pelaporan tindaklanjut dan pemeriksaan dilaporkan tepat waktu

10. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi sesuai ketentuan	87,62	99,72	113,81%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi sesuai ketentuan adalah 99,71 dan Capaian indikator berikut sebesar 113,81% dengan kategori capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi sesuai ketentuan	87,62	99,72	113,81% ▲ Tercapai

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Tercapai" karena telah mencapai target tahunan 2025 Balai POM di Dumai.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi sesuai ketentuan telah mencapai target kinerja triwulan I dikarenakan:

- Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi sesuai dengan dengan target Iklan yang telah direncanakan;
- Pelaporan Iklan telah dilaporkan tepat waktu.

Namun, pada komoditi Pangan Olahan belum mencapai nilai optimal dikarenakan:

- Pada iklan produk Pangan, terdapat persentase perhitungan proposi pada Media Iklan yang diawasi. Pada triwulan I, Balai POM di Dumai masih belum melakukan pengawasan iklan pangan pada seluruh media namun sudah melakukan perbaikan pada triwulan II.

b. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi sesuai ketentuan didukung dengan kegiatan:

- Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan Iklan dan pedoman penandan Iklan;
- Pelaporan Iklan dilaporkan sesuai dengan *timeline*.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

c. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	30,00	30,00	100,00%	**Sangat Baik**

Realisasi Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 30,00 dan Capaian indikator berikut sebesar 1000,00% dengan kategori capaian "Sangat Baik".

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60,00	30,00	50,00% ▼ Perlu Upaya Keras

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Perlu Upaya Keras" karena belum mencapai target tahunan 2025 Balai POM di Dumai.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Balai POM di Dumai telah melakukan perencanaan ulang dan telah memeriksan 3 sarana produksi Pangan Fortifikasi sesuai dengan ketentuan dan dilaporkan tepat waktu.

b. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai POM di Dumai telah Menyusun perencanaan ulang pada target pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi dan telah melakukan revisi target bulanan pada RAPK Balai POM di Dumai.

SASARAN STRATEGIS 3

Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
  1. Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium;
  4. Standar Metode yang terverifikasi.

- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
  1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium.

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9	9,22	102,44%	**Sangat Baik**

Realisasi Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 9,22 dan Capaian indikator berikut sebesar 102,44% dengan kategori capaian "Sangat Baik".

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	9,22	83,82%  Akan Tercapai

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Akan Tercapai" karena belum mencapai target tahunan 2025 Balai POM di Dumai.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dihitung berdasarkan Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Peralatan.

Nilai penilaian Standar Ruang Lingkup Balai POM di Dumai 6,54%, Standar Pemenuhan Laboratorium 12,50% dan Standar Pemenuhan Kompetensi Laboratium 20,00%.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT didukung dengan Kegiatan:

1. Pemenuhan pengadaan reagen pengujian Kimia;
2. Pemenuhan pengadaan peralatan Laboratorium Kimia.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. **Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah ukuran Efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

a) Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media cetak dan elektronik;
b) Komunikasi, Informasi dan Edukasi langsung ke masyarakat; dan
c) Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Tingkat Memenuhi Ekspektasiitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

A. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,83	88,41	103,01%	**Sangat Baik**

Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah 88,41 dan Capaian indikator berikut sebesar 103,01% dengan kategori capaian "Sangat Baik".

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,83	88,41	103,01% ▲ Tercapai

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Tercapai" karena telah mencapai target tahunan 2025 Balai POM di Dumai.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Survey ini diisi oleh 58 orang yang merupakan peserta kegiatan KIE secara tatap muka dan melalui layanan social media. Kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh Balai POM di Dumai hingga Triwulan II dengan jumlah peserta 452 orang, namun yang diklaim sebagai capaian target Balai POM di Dumai adalah sebanyan 70 orang.

Kegiatan tersebut berupa:

- KIE "Cek Produkmu Bersama BPOM" di Area CFD Dumai
- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pangan Jajanan Anak Sekolah (KIE PJAS) dalam rangka HUT BPOM ke 24

- Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi DATUK PANGLIMA (eDukasi obAT dan makanan UntuK penumPANG kapal) di Kapal Penyebrangan Dumai – Rupat
- Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Keamanan Pangan Takjil di Dumai, Duri dan Bagan Siapi – api.
- KIE Retail pada Sarana Distribusi Pangan

Pada triwulan II, Balai POM di Dumai juga melaksanakan Penyebaran Informasi terkait Obat dan Makanan melalui Layanan Komunikasi Publik diantaranya:

- Layanan Media Sosial: Instagram, Facebook, TikTok dan Youtube
- Layanan Permintaan Informasi dan Pengaduan
- Iklan Layanan Masyarakat
- SMS Blast
- INFOPOM

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Pencapaian yang maksimal pada indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan didukung terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- Melaksanakan Kegiatan KIE secara daring maupun luring kepada seluruh masyarakat di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.
- Melakukan inovasi – inovasi dalam penyebaran informasi terkait Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu melalui Progam DATUK PANGLIMA ke wilayah – wilayah perbatas melalui transportasi kapal RORO.
- Melakukan penyebaran informasi melalui berbagai media seperti Layanan Iklan di Radio, Talkshow, SMS Blast, INFOPOM pada Puskesmas.

2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis

yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	25,00	75,00	300,00%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah 75,00 dan Capaian indikator berikut sebesar 100,00% dengan kategori capaian "Tidak Dapat".

Realisasi Kinerja indikator ini tidak sesuai dengan target yang dutetapkan diakrenakan terdapat perubahan jadwal tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kota Dumai yang semula mulai dilaksanakan pada bulan Juli, berdasarkan arahan dari Unit Pengampu harus diselesaikan pada bulan Juni dengan justifikasi apabila terdapat pembukaan blokir anggaran masih ada waktu untuk pelaksanaan kegiatan Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan pada 1 sekolah lagi.

Untuk menindaklanjuti persentase capaian kinerja yang melebihi 110%, Balai POM di Dumai akan mengajukan revisi target bulanan RAPK kepada Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan Agustus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk target B08 – B11 tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	2,00	75,00	-

Target Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada akhir tahun 2025 berupa Output 2 Sekolah. Sementara target dan capaian bulanan berupa bobot penjumlahan tiap tahapan. Sehingga belum dapat dihitungkan perbandingan capaian kinerja triwulan II dengan Target Kinerja Tahun 2025.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pelaksanaan kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan te;ah disusun sesuai dengan tahapan kegiatan dan telah ditentukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Namun terdapat perubahan pada tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kota Dumai yang semula mulai dilaksanakan pada bulan Juli, berdasarkan arahan dari Unit Pengampu harus diselesaikan pada bulan Juni dengan justifikasi apabila terdapat pembukaan blokir anggaran masih ada waktu untuk pelaksanaan kegiatan Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan pada 1 sekolah lagi.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian indikator pada triwulan II, didukung oleh kegiatan:

a. Audiensi dan Rapat Pembahasan Kegiatan Pro PN (Sekolah, Desa dan Pasar Aman)
b. Advokasi dan Koordinasi Kegiatan Pro PN (Sekolah, Desa dan Pasar Aman)
c. Sosialisasi Keamanan Pangan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

d. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kota Dumai

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- Kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	27,00	25,00	92,59%	**Baik**

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman adalah 25,00 dan Capaian indikator berikut sebesar 92,59% dengan kategori capaian “Baik”.

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Jumlah Desa Pangan Aman	1,00	27,00	-

Target Jumlah Desa Pangan Aman pada akhir tahun 2025 berupa Output 1 Desa. Sementara target dan capaian bulanan berupa bobot penjumlahan tiap tahapan. Sehingga belum dapat dihitungkan perbandingan capaian kinerja triwulan II dengan Target Kinerja Tahun 2025.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Hingga triwulan II, kegiatan Desa Pangan Aman baru melaksanakan kegiatan Advokasi sehingga belum ada capaian untuk tahapan kegiatan selanjutnya.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian indikator pada triwulan I, didukung oleh kegiatan:

a. Audiensi dan Rapat Pembahasan Kegiatan Pro PN (Sekolah, Desa dan Pasar Aman)
b. Advokasi dan Koordinasi Kegiatan Pro PN (Sekolah, Desa dan Pasar Aman)

4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas

pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar , pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	75,00	75,00	100,00%	**Sangat Baik**

Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas adalah 75,00 dan Capaian indikator berikut sebesar 100% dengan kategori capaian “Baik”.

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1,00	25,00	-

Target Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas pada akhir tahun 2025 berupa Output 1 Desa. Sementara target dan capaian bulanan berupa bobot penjumlahan tiap tahapan. Sehingga belum dapat dihitungkan perbandingan capaian kinerja triwulan II dengan Target Kinerja Tahun 2025.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Balai POM di Dumai telah melakukan revisi target RAPK pada bulan April untuk melakukan revisi pada target B04 – B11 untuk melakukan penyesuaian pad atarget tahapan Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas sehingga capaian kinerja Balai POM di Dumai telah selaras dengan target yang ditetapkan.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian indikator pada triwulan I, didukung oleh kegiatan:

a. Audiensi dan Rapat Pembahasan Kegiatan Pro PN (Sekolah, Desa dan Pasar Aman)
b. Advokasi dan Koordinasi Kegiatan Pro PN (Sekolah, Desa dan Pasar Aman)

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat CPOBA, CPOKB dan/atau IP CPPOB Pengan Olahan

Persentase UMKM yang memenuhi standar mencakup :

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
  1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B
  2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
  3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
  4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Rumus perhitungan persentase keputusan pendampingan UMKM Yang memnuhi Standar Cara Produksi yang baik adalah sebagai berikut:

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

- **Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan I**

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat CPOBA, CPOKB dan/atau IP CPPOB Pengan Olahan	30	65,75	219,17%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat CPOBA, CPOKB dan/atau IP CPPOB Pengan Olahan adalah 65,75 dan Capaian indikator berikut sebesar 219,17% dengan kategori capaian "Tidak Dapat Disimpulkan".

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat CPOBA, CPOKB dan/atau IP CPPOB Pengan Olahan	91,00	65,75	72,25% Akan Tercapai

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam “akan Tercapai” untuk dapat mencapai target kinerja Tahun 2025.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Hingga triwulan II, dalam mendukung pencapaian Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat CPOBA, CPOKB dan/atau IP CPPOB Pengan Olahan telah dilaksanakan:

- Menjalankan program pendampingan UMKM SEDAP MALAM, sebagai salah satu upaya percepatan perizinan bagi UMKM dan menciptakan inovasi untuk percepatan sertifikasi.
- Mendorong pelaku usaha agar lebih berkomitmen dan mandiri dalam pemenuhan aspek standar produksi pangan olahan yang baik
- Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta Kegiatan KIE Pangan Olahan

Selain itu, terdapat 1 pelaku usaha UMK Pangan Olahan yang telah menyelesaikan pendampingan UMK Pangan Plahan karena secara mandiri berkomitmen melakukan perbaikan sarana dengan cepat dan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan sehingga secara keseluruhan Balai POM di Dumai telah menyelesaikan 1 target pendampingan UMKM Pangan Olahan.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang menunjang Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat CPOBA, CPOKB dan/atau IP CPPOB Pengan Olahan adalah melaksanakan pendampingan UMKM secara intensif melalui program SEDAP MALAM. Selain itu telah dilaksanakannya Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sebagai salah satu langkah dalam pendampingan terhadap pelaku usaha.

SASARAN STRATEGIS 6

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
  SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
  Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
  P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
  Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Nilai tingkat keberhasilan penindakan ={(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara) .

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	-	-

Pada Triwulan II, Balai POM di Dumai belum menetapkan target keberhasilan penindakan. Hal ini dikarenakan pada Triwulan II, di Dumai masih berfokus pada Operasi Intelijen dan Pendalaman Informasi terkait Tindak Pidana Perkara yang sedang dikerjakan.

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95,00	0,00	0,00% ▼ Perlu Upaya Keras

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Perlu Upaya Keras" untuk dapat mencapai target kinerja Tahun 2025.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dalam upaya melakukan pengawasa terhadap tindak pidana terhadap pelanggaran pada bidang Obat dan Makanan, Balai POM di Dumai terus melakukan pendalaman informasi sebelum melakukan tindak penindakan terhadap sarana maupun perorangan

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Selain melakukan pendalaman informasi, Balai POM di Dumai juga menjalin kerjasama dan meningkatkan sinergitas kepada Lintas Sektor terkait dalam upaya penanganan tindak pidana perkara obat dan makanan. Melalui dukungan yang diberikan olah lintas sektor tersebut, Balai POM di Dumai mengaharpakan akan ada efek jera yang diberikan kepada pelaku untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut dikemudian hari.

SASARAN STRATEGIS 7

Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejatahan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
    a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
    b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	**Sangat Baik**

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Balai POM di Dumai adalah 50,00, dengan capaian 100,00% dengan kategori "Sangat Baik".

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	95,00	50,00	52,63% ▼ Perlu Upaya Keras

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Perlu Upaya Keras" untuk dapat mencapai target kinerja Tahun 2025.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sesuai dengan Nota Dinas dari Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor PD.01.02.61.07.25.135 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Bulan Januari s.d Juni 2025, Balai POM di Dumai telah melaporkan secara Tepat Waktu. Laporan Patroli Siber dan Profilling Siber telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan.

Namun, terdapat kendala dalam melakukan pelaporan karena pada Aplikasi Dashboard Penindakan sering mengalami error. Sehingga petugas sering tertunda dalam melaporkan kegiatan pada jam kerja.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam menunjang keberhasilan capaian indikator tersebut, petugas sering melakukan pengecekan secara berkala pada Aplikasi Dashboard Penindakan dalam pelaksanaan profilling siber guna menghindari keterlambatan waktu pelaporan.

SASARAN STRATEGIS 8

Layanan Publik UPT yang Prima

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

a. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
b. Profesionalitas SDM (25%);
c. Sarana Prasarana (18%);
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
f. Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis	-	-	-	-

Indeks Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis akan dievaluasi pada akhir tahun 2025, sehingga pada triwulan I tidak terdapat target dan capaian Indikator tersebut.

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Indeks Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis	95,00	0,00	0,00%  Perlu Upaya Keras

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Perlu Upaya Keras" untuk dapat mencapai target kinerja Tahun 2025.

SASARAN STRATEGIS 9

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

1. Nilai AKIP Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

a. Perencanaan Kinerja;
b. Pengukuran Kinerja;
c. Pelaporan Kinerja;
d. Evaluasi Kinerja Internal;

e. Capaian Kinerja.

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Unit Pelaksana Teknis	-	-	-	-

Nilai AKIP Unit Pelaksana Teknis akan dievaluasi pada untuk nilai akhir pada tahun 2025, sehingga pada triwulan I tidak terdapat target dan capaian Indikator tersebut.

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Nilai AKIP Unit Pelaksana Teknis	78,00	0,00	0,00% ▼ Perlu Upaya Keras

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Perlu Upaya Keras" untuk dapat mencapai target kinerja Tahun 2025.

2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Pelaksana Teknis

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). IKPA merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan value for money belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.

Penilaian IKPA Tahun 2024 meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu:

- Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 2 indikator: (1) Revisi DIPA dan (2) Deviasi Halaman III DIPA;

- Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 5 indikator: (1) Penyerapan Anggaran, (2) Belanja Kontraktual, (3) Penyelesaian Tagihan, (4) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan (5) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); serta
- Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan 1 indikator: (1) Capaian Output.

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Dumai diperoleh dengan rumus :

(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

b. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan PI

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Unit Pelaksana Teknis	-	-	-	-

Nilai Kinerja Anggaran Unit Pelaksana Teknis akan dapat dilihat pada akhir tahun 2025, sehingga tidak terdapat target dan realisasi sepanjang tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Nilai Kinerja Anggaran Unit Pelaksana Teknis	5	0,00	0,00% ▼ Perlu Upaya Keras

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam “Perlu Upaya Keras” untuk dapat mencapai target kinerja Tahun 2025.

3. Indeks Manajemen Risiko Unit Pelaksana Teknis

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan

pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko

3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

c. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Indeks Manajemen Risiko Unit Pelaksana Teknis	-	-	-	-

Indeks Manajemen Risiko Unit Pelaksana Teknis akan dapat dilihat pada akhir tahun 2025, sehingga tidak terdapat target dan realisasi sepanjang tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Indeks Manajemen Risiko Unit Pelaksana Teknis	2,7	0,00	0,00% ▼ Perlu Upaya Keras

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Perlu Upaya Keras" untuk dapat mencapai target kinerja Tahun 2025.

4. Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup Unit Pelaksana Teknis

Reformasi birokrasi menjadi salah saru langkah pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi) ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Rencana aksi memuat strategi dan program Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di berbagai kebijakan dalam delapan area perubahan reformasi birokrasi yakni :

1. Mental Aparatur
2. Pengawasan
3. Akuntabilitas Kinerja

4. Kelembagaan
5. Tatalaksana
6. SDM Aparatur
7. Peraturan Perudangan-Undangan
8. Pelayanan Publik

Reformasi Birokrasi dibagi pada beberapa Pokja yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penguatan Akuntabilitas, dan Pokja Penguatan Pengawasan.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	50	50	100,00%	**Sangat Baik**

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian Terhadap Target Tahunan
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	100,00	50,00	50,00% ▼ Perlu Upaya Keras

Kategori capaian kinerja indikator berikut termasuk dalam "Perlu Upaya Keras" untuk dapat mencapai target kinerja Tahun 2025.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Triwulan II telah mencapai target dengan kriteria "Baik". Hal ini didukung oleh kepatuhan dan komitmen Petugas Balai POM di Dumai dalam melaksanakan rencana aksi reformasi

birokrasi yang telah disusun pada awal tahun sesuai dengan area perubahan yang ditentukan.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Petugas Balai POM di Dumai telah melaksanakan seluruh rencana aksi reformasi birokrasi yang telah disusun sesuai dengan masing masing area perubahan reformasi birokrasi.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	Adanya keterlambatan pelaporan SLA Pengujian lebih dari 15 HK pada sampel Sediaan Farmasi	Melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Petugas Pengujian untuk memberikan hasil SLA Pengujian sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan sehingga tidak ada keterlambatan SLA Pengujian pada triwulan berikutnya	Desember	Melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Petugas Pengujian untuk memberikan hasil SLA Pengujian sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan sehingga tidak ada keterlambatan SLA Pengujian pada triwulan berikutnya	Tetap terus melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Petugas Pengujian untuk memberikan hasil SLA Pengujian sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan	Desember	Masih terdapat beberapa sampel yang melebihi SLA pengujian. Hal ini disebabkan karena Balai Penguji kurang SDM dalam melakukan pengujian sampel
2.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	Sesuai dengan ketentuan samping dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-
3.	Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar	Tidak terdapat sampel KLB di wilayah kerja	-	-	-	-	-	-

		Balai POM di Dumai						
4.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat ketidaksesuaian parameter uji dan Ketepatan Pengambilan Kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi dari Unit Pengampu	Melakukan konfirmasi dari oleh BBPOM di Pekanbaru sebagai Balai Penguji kepada ITSM Pusdatin untuk mengkonfirmasi atas kesalahan penginputan hasil uji pada SIPT .	September	Melakukan konfirmasi kepada Unit Pengampu terkait kategori sampel yang telah disampling apakah dapat diperhitungkan sebagai capaian	Melakukan *follow up* atas konfirmasi dari oleh BBPOM di Pekanbaru sebagai Balai Penguji kepada ITSM Pusdatin untuk mengkonfirmasi atas kesalahan penginputan hasil uji pada SIPT .	September	-
			untuk kesesuaian parameter uji akan dilakukan konfirmasi dan justifikasi atas ketidaksesuaian parameter tersebut kepada BBPOM di Pekanbaru	September	-	Melakukan konfirmasi dan meminta justifikasi atas ketidaksesuaian parameter tersebut kepada BBPOM di Pekanbaru	-	-

5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Masih terdapat rekomendasi CAPA yang belum mendapatkan *feedback* dari Pelaku Usaha		April	Mengatur ulang perencana pelaksanaan pemeriksaan sarana yang memiliki CAPA untuk tidak dilakukan pemeriksaan diakhir bulan agar Rekomendasi yang diterbitkan dapat diterima pada bulan yang sama	-	April	Telah mengurangi Pemeriksaan sarana yang dilakukan pada akhir bulan
			Melakukan penagihan atas *feedback* CAPA kepada sarana yang belum mengirimkan	September	-	Melakukan penagihan atas *feedback* CAPA kepada sarana yang belum mengirimkan	September	Masih terdapat rekomendasi CAPA yang belum mendapatkan *feedback* dari Pelaku Usaha

		Terdapat surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan yang belum ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan terkait hasil pengujian sampel PIRT yang TMS	Melakukan *follow up* kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan tindaklanjut atas rekomendasi tersebut	September	-	Melakukan *follow up* kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan tindaklanjut atas rekomendasi tersebut	September	Masih terdapat Surat Rekomendasi kepada Dinas Kesehatan yang belum diberikan *feedback*
6.	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	Mengusulkan perubahan target kinerja bulanan RAPK kepada Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	Sudah melakukan perubahan target bulanan
7.	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-
8.	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-

9.	Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-
10.	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi sesuai ketentuan	-	-	-	Melakukan konfirmasi kepada Unit Pengampu dan melakukan perhitungan ulang terhadap target Iklan Pangan	-	-	Pengawasan iklan telah memenuhi proporsi masing masing media
11.	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	Mengusulkan perubahan target kinerja bulanan RAPK kepada Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	Sudah melakukan perubahan target bulanan
12.	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Sesuai dengan perhitungan SKL Lab yang dilakukan oleh PPPPOMN	-	-	-	-	-	-
13.	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Survey Efektivitas KIE telah dilaksanakan	-	-	-	-	-	-

		sesuai dengan ketentuan						
14.	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Terdapat perubahan jadwal tahapan yang semula direncakan pada bulan Juli menjadi bulan Juni sehingga capaian kinerja melebihi 110%	Mengusulkan perubahan target kinerja bulanan RAPK kepada Biro Perencanaan dan Keuangan	September	Mengusulkan perubahan target kinerja bulanan RAPK kepada Biro Perencanaan dan Keuangan	Mengusulkan perubahan target kinerja bulanan RAPK kepada Biro Perencanaan dan Keuangan	September	Sudah melakukan perubahan target bulanan hingga B07.
15.	Jumlah Desa Pangan Aman	-	-	-	Mengusulkan perubahan target kinerja bulanan RAPK kepada Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	Sudah melakukan perubahan target bulanan
16.	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	-	-	-	-	Mengusulkan perubahan target kinerja bulanan RAPK kepada Biro Perencanaan dan Keuangan	Mei	-
17.	Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat	Telah melakukan Fasilitas Pendampingan	-	-	-	-	-	-

	CPOBA, CPOKB dan/atau IP CPPOB Pengan Olahan	UMK Pangan Olahan						
18.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Masih dalam progress Operasi Intelijen	-	-	-	-	-	-
19.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	-	-	-	Melakukan monitoring terhadap tenggat waktu pelaporan dan monitoring aplikasi siber	-	-	-
20.	Indeks Pelayanan Publik UPT	Melaksanakan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan	-	-	-	-	-	-
21.	Nilai AKIP UPT	Melakukan TL atas hasil Evaluasi SAKIP 2024	Melakukan monitoring terhadap indikator penilaian AKIP dan Menyusun Pelaposan SAKIP sesuai pedoman SAKIP Badan POM	Desember	-	Melakukan monitoring terhadap indikator penilaian AKIP dan Menyusun Pelaposan SAKIP sesuai pedoman SAKIP Badan POM	Desember	-
22.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Melaksanakan Pengelolaan	Melakukan pengawalan	Desember		Melakukan pengawalan	Desember	-

		Anggaran sesuai dengan ketentuan	terhadap pelaksanaan Indikator penilaian IKPA			terhadap pelaksanaan Indikator penilaian IKPA		
23.	Indeks Manajemen Risiko UPT	-	-	-	Melakukan reviu atas Daftar Risiko untuk dilaporkan pada Semester II	-	-	Telah melaporkan secara tepat waktu
24.	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Implementasi Rencana Aksi RB pada masing – masing Pokja	Menyusun dan melaksanakan progam progam Reformasi Birokrasi yang menjadi data dukung dalam pencanangan Zona Integritas pada tahun 2026	Desember	-	Menyusun dan melaksanakan progam progam Reformasi Birokrasi yang menjadi data dukung dalam pencanangan Zona Integritas pada tahun 2026	Desember	-

3.3 Realisasi Anggaran

Balai POM di Dumai pada tahun 2025 memperoleh anggaran sesuai SP: DIPA – 063.01.2.672849/2025 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp15.768.463.000. Pada Tahun 2025, menindaklanjut Inpres 1 tahun 2025, total anggaran Balai POM di Dumai yang diblokir sebesar Rp12.080.523.000.

Realisasi anggaran Balai POM di Dumai sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.601.792.833 dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 10,03% dengan pagu anggaran Automatic Adjustment tahun 2025. Jika tanpa Automatic Adjustment maka realisasi anggaran Balai POM di Dumai adalah 41,25%.

Sampai dengan semester I tahun 2025, Balai POM di Dumai telah melakukan revisi sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA I Kewenangan DJA, Balai POM di Dumai dilakukan pada 22 Februari 2025, dalam rangka Revisi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 sesuai dengan arahan Instruksi Presiden 1 Tahun 2025, pagu anggaran Balai POM di Dumai di blokir sebesar Rp12.901.763.000,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
2. Revisi DIPA II Kewenangan DJA, Balai POM di Dumai dilakukan pada tanggal 21 Maret 2025 sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.03.25.153 tanggal 12 Maret 2025 perihal Revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM ke-2 Kewenangan Direktorat Jenderal anggaran TA 2025.
3. Revisi DIPA III Kewenangan DJA, Balai POM di Dumai dilakukan pada tanggal 10 April 2025 sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.03.25.174 tanggal 26 Maret 2025 perihal Revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM ke-3 Kewenangan Direktorat Jenderal anggaran TA 2025.
4. Revisi DIPA IV Kewenangan Kanwil DJPb Riau dalam rangka revisi Halaman III DIPA untuk Triwulan II dilakukan pada tanggal 24 April 2025.

Berikut perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran Loka POM di Kota Dumai Tahun 2025, sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis		Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Kinerja	Rencana Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	81,25	93,96	115,64	145.716.000	41.570.390	28,53
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	75,00	99,26	132,35	123.811.000	25.572.730	20,65
		3	Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00			
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	94,00	110,59			
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	45,00	67,84	150,76	315.395.000	76.242.920	24,17

		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	100,00	111,11			
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	100,00	111,11			
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,38	98,06	105,01			
		9	Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	99,17	116,67			
		10	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi sesuai ketentuan	87,62	99,72	113,81			
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	30,00	30,00	100,00	8.470.000	3.619.500	42,73

3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9,00	9,22	102,44	502.763.000	25.143.820	5,00
4	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,83	88,41	103,01	31.378.500	13.032.419	41,53
		2	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	25,00	75,00	300,00	38.442.000	26.324.600	68,48
		3	Jumlah Desa Pangan Aman	27,00	25,00	92,59	91.074.000	8.591.400	9,43
		4	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	75,00	75,00	100,00	36.606.000	12.946.500	35,37
5	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat CPOBA, CPOKB dan/atau IP CPPOB Pengan Olahan	30,00	65,75	219,17	680.000	680.000	100,00
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0,00	0,00	0,00	107.821.000	26.554.000	24,63

7	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejatahan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00	8.940.000	8.434.815	94,35
8	Layanan Publik UPT yang Prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		-	0,00	21.203.500	9.972.140	47,03
9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai AKIP UPT		-	0,00	15.592.750	15.221.513	97,62
		1	Nilai Kinerja Anggaran UPT		-	0,00	2.403.756.750	1.277.443.111	53,14
		1	Indeks Manajemen Risiko UPT			0,00	15.592.750	15.221.513	97,62
		2	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50,00	50,00	100,00	15.592.750	15.221.513	97,62

Berikut realisasi anggaran Balai POM di Dumai perkegiatan Tahun 2025, sebagai berikut:

No.	Target Kinerja	Anggaran		
		Rencana Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kota Dumai	8.940.000	8.434.815	94,35%
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kota Dumai	10.744.000	5.628.000	52,38%
3	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	23.847.000	8.100.600	33,97%
4	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	62.371.000	60.886.051	97,62%
5	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kota Dumai	17.991.000	9.275.959	51,56%
6	Sarana Bidang Kesehatan	5.000.000	3.571.648	71,43%
7	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-
8	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	119.002.000	25.143.820	21,13%
10	Perkara di Bidang Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Dumai	107.821.000	26.554.000	24,63%
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	38.442.000	26.324.600	68,48%
12	Desa Pangan Aman	91.074.000	8.591.400	9,43%
13	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	36.606.000	12.946.500	35,37%
14	UMKM yang Didampingi dalam Pemenuhan Standar oleh Loka POM di Kota Dumai	680.000	680.000	100,00%
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kota Dumai	123.811.000	25.572.730	20,65%

16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM di Kota Dumai	145.716.000	41.570.390	28,53%
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM Dumai	85.909.000	17.552.920	20,43%
18	Sarana Produksi Fortifikasi yang Diperiksa oleh Loka POM Dumai	8.470.000	3.619.500	42,73%
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM Dumai	229.486.000	58.690.000	25,57%
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	383.761.000	-	0,00%
21	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.383.164.000	1.258.649.950	52,81%
	JUMLAH	**3.882.835.000**	**1.601.792.883**	**41,25%**

Berdasarkan Analisa efisiensi sumberdaya, melalui pengukuran input dan output di Balai POM di Dumai diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	IE	TE	Kategori
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Dumai	1,06	0,06	Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Dumai	1,91	0,91	Efisien
3	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	2,94	1,94	Tidak Efisien
4	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1,02	0,02	Efisien
5	Layanan Publikasi Keamanan dan	1,94	0,94	Efisien

No	Program/Kegiatan	IE	TE	Kategori
	Mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Dumai			
6	Sarana Bidang Kesehatan	1,05	0,05	Efisien
7	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-
8	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	4,73	3,73	Tidak Efisien
10	Perkara di Bidang Obat dan Makanan di Balai POM di Dumai	-	-	-
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0,73	-0,27	Tidak Efisien
12	Desa Pangan Aman	-	-	-
13	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	-	-	-
14	UMKM yang Didampingi dalam Pemenuhan Standar oleh Balai POM di Dumai	-	-	-
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Dumai	4,84	3,84	Tidak Efisien
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Balai POM di Dumai	1,48	0,48	Efisien
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Dumai	4,89	3,89	Tidak Efisien
18	Sarana Produksi Fortifikasi yang Diperiksa oleh Balai POM di	2,34	1,34	Tidak Efisien

No	Program/Kegiatan	IE	TE	Kategori
	Dumai			
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Dumai	3,91	2,91	Tidak Efisien
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	-	-	Efisien
21	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,89	0,89	Efisien

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Masih banyak kegiatan Balai POM di Dumai yang Tidak Efisiensi hal ini dikarenakan terdapat pemblokiran anggaran dalam rangka Efisiensi Anggaran sehingga terdapat penyesuaian target output pada Triwulan II.

BAB IV

PENUTUP

a. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai POM di Dumai Triwulan I Tahun 2025 menyajikan pengukuran capaian sasaran kegiatan Balai POM di Dumai yang dibandingkan dengan Target Triwulan II Tahun 2025 yang telah ditetapkan, termasuk berbagai keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian sasaran kegiatan. Secara umum capaian sasaran kegiatan menunjukkan perkembangan yang signifikan meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen di lingkungan Balai POM di Dumai, lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Pencapaian sasaran kegiatan diukur dengan 9 sasaran strategis dan 24 indikator kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Dumai berhasil Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan NSS sebesar **118,56%** dengan kriteria "**Tidak Dapat Disimpulkan**";
2. Pada Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Dumai Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan NSS sebesar **100,00%** dengan kriterian **angat Baik"**;
3. Pada Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Dumai berhasil Menguatkan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan NSS sebesar **102,44%** dengan kriteria "**Sangat Baik**";
4. Pada Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Dumai berhasil Meningkatkan Efektivitas KIE dengan NSS sebesar **148,90%** dengan kriteria " **Tidak Dapat Disimpulkan**";
5. Pada Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Dumai berhasil Meningkatkan Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu dengan NSS sebesar **219,17%** dengan kriteria "**Tidak Dapat Disimpulkan**";

6. Pada Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Dumai Sasaran Strategis Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efekti**f** belum terdapat realisasi dan capaian;
7. Pada Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Dumai berhasil Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejatahan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dengan NSS sebesar **100%** dengan kriteria **"Sangat Baik";**
8. Pada Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Dumai Layanan Publik UPT yang Prima belum terdapat realisasi dan capaian;
9. Pada Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Dumai berhasil Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal dengan NSS sebesar **100,00%** dengan kriteria **"Sangat Baik**".

Balai POM di Dumai pada tahun 2025 memperoleh anggaran sesuai SP: DIPA – 063.01.2.672849/2025 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp15.768.463.000. Pada Tahun 2025, menindaklanjut Inpres 1 tahun 2025, total anggaran Balai POM di Dumai yang diblokir sebesar Rp12.080.523.000.

Realisasi anggaran Balai POM di Dumai sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.601.792.833 dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 10,03% dengan pagu anggaran Automatic Adjustment tahun 2025. Jika tanpa Automatic Adjustment maka realisasi anggaran Balai POM di Dumai adalah 41,25%.

b. REKOMENDASI YANG DAPAT DILAKUKAN DITAHUN BERIKUTNYA

- Melakukan perencanaan kembali terkait target produk sampel Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam Pelaksanaan Sampling;
- Melakukan perencanaan kembali dalam Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), terutama untuk IKU yang menjadi baseline pada perencanaan strategis Balai POM di Dumai;
- Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2025;

- Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dan stakeholder terkait Tindak Lanjut Surat Rekomendasi yang dikirimkan;
- Meningkatkan koordinasi dengan Balai – Balai Regionalisasi Laboratorium dalam rangka pengujian sampel;
- Mengawal realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan dengan melakukan Rapat Internal.